

ANALISIS PERAN TNI DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL GUNA MENGHADAPI PERANG MODERN

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum.

a. Globalisasi telah membawa pengaruh dan merubah segala lini sendi kehidupan masyarakat di semua belahan dunia sebagai akibat terjadinya kemajuan di bidang teknologi dan informasi yang telah mengakibatkan hilangnya batas ruang dan waktu serta tidak mengenal batas wilayah. Hal ini merupakan kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap bangsa dan negara di dunia termasuk Indonesia, karena apabila tidak menyesuaikan maka akan menjadi sasaran bagi negara-negara yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi tersebut. Globalisasi yang terjadi di suatu negara akan berdampak pada berbagai bidang kehidupan yaitu: bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. Dalam memenuhi kebutuhan nasionalnya semua negara-negara di dunia terpaksa harus merubah strateginya karena dari waktu ke waktu secara global, dunia mengalami perubahan yang sangat cepat dengan melibatkan aktor negara (*Actor state*) maupun aktor non negara (*Actor non state*). Dengan adanya perubahan strategi yang dilakukan oleh negara-negara di dunia juga telah berdampak pada terjadinya perubahan bentuk dan sifat ancaman di tingkat nasional, kawasan, maupun internasional yang semakin modern, multi dimensi, dan bersifat kompleks. Bentuk dan sifat ancaman tersebut telah merubah bentuk perang dengan pola gaya lama yang bersifat konvensional dan menggunakan kekuatan fisik, sedangkan saat ini lebih

mengedepankan bentuk perang dengan pola gaya baru yang lebih *soft power* dalam praktek operasionalnya cenderung non-kekerasan dengan tujuan untuk menghancurkan Nasionalisme dan Ideologi suatu negara yang disebut dengan Perang Asimetris (*Asymmetric Warfare*) yang merupakan perang non militer atau dalam bahasa populernya dinamai *smart power*, atau perang non konvensional dan merupakan perang murah meriah, tetapi memiliki daya hancur lebih dahsyat daripada bom atom.

Dewan Riset Nasional (DRN) mendefinisikan Perang Asimetris adalah :

“Perang asimetris adalah suatu model peperangan yang dikembangkan dari cara berpikir yang tidak lazim dan di luar aturan peperangan yang berlaku, dengan spektrum perang yang sangat luas dan mencakup aspek-aspek astagatra (perpaduan antara trigatra yaitu geografi, demografi dan sumber daya alam serta pancagatra yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Perang asimetris selalu melibatkan peperangan antara dua aktor atau lebih, dengan ciri menonjol dari kekuatan yang tidak seimbang”.¹

Hal ini mengisyaratkan bahwa perang asimetris yang saat ini sedang berkembang adalah perang yang berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, walaupun tidak menutup kemungkinan juga dapat terjadi perang kedua-duanya baik yang bersifat konvensional maupun non konvensional seperti yang terjadi di negara-negara Timur Tengah.

Menurut Global Future Institute (GFI) Jakarta pada 24 Maret 2015.

“Perang asimetris merupakan metode peperangan gaya baru secara Nir-militer (non militer) namun daya hancurnya tidak kalah bahkan dampaknya lebih dahsyat daripada perang militer. Ia memiliki medan atau lapangan tempur luas meliputi segala aspek kehidupan (astagatra).”

¹ Dewan Riset Nasional tentang definisi perang Asimetris.

Perang asimetris memiliki medan dan lapangan tempur yang luas namun memiliki dampak yang sangat dahsyat. Adapun sasaran perang non-militer tak hanya satu aspek tetapi juga beragam aspek dapat dilakukan bersamaan atau secara simultan dengan intensitas berbeda: 1) membelokkan sistem sebuah negara sesuai kepentingan kolonialisme; 2) melemahkan ideologi serta mengubah pola pikir rakyatnya; 3) menghancurkan ketahanan pangan dan *energy security* (jaminan pasokan energinya), 4) menciptakan ketergantungan negara target atas kedua hal tersebut (*food and energy security*).² Korelasi antara sasaran perang asimetris dengan ketahanan nasional suatu bangsa sangat berkaitan erat karena meliputi aspek yang sama termasuk bangsa Indonesia. Oleh karena itu diperlukan ketahanan nasional bangsa Indonesia yang kuat agar dapat menghadapi segala ancaman tersebut.

b. Di dalam Pembukaan UUD 1945 tercantum cita-cita nasional antara lain: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam mewujudkan cita-cita nasional tersebut banyak mengalami berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik secara langsung maupun tidak langsung dan yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya-upaya yang dilakukan melalui pembangunan kekuatan penangkalan yang dituangkan dalam sebuah konsep Geostrategi yang merupakan strategi pencapaian yang didasarkan pada kondisi geografis Indonesia. Kekuatan untuk menghadapi masalah tersebut dikenal dengan istilah Ketahanan Nasional. Ketahanan nasional perlu dibina secara terus-menerus dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis baik nasional, regional, dan internasional, sehingga diharapkan kelangsungan

² Global Future Institute (GFI) Jakarta pada 24 Maret 2015

hidup bangsa dan negara Indonesia dapat dijamin. Dalam sejarah perjuangan bangsa ketahanan bangsa Indonesia telah teruji yaitu dibuktikan dengan adanya perjuangan bangsa Indonesia yang telah mampu mengusir penjajahan Jepang dan Belanda serta menghadapi separatis RMS, PRRI, Permesta, DI TII, PKI, GAM, Papua Merdeka. Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap tegak berdiri karena memiliki daya tahan dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG). Bangsa Indonesia menghadapi permasalahan KKN, Krisis moneter, kemiskinan, pengangguran, konflik SARA, pelanggaran HAM, SDM yang rendah, globalisasi, namun hanya dengan ketahanan bangsa/ketahanan nasional saja kelangsungan hidup bisa terjamin. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamika suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.³ Dalam perkembangannya ketahanan nasional bangsa Indonesia sangat dinamis dan mengalami pasang surut sesuai dengan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan pengelolaan negara maupun akibat pengaruh luar negeri. Hasil survei Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI menunjukkan bahwa Indeks Ketahanan Nasional Indonesia pada tahun 2016 masih berada dalam posisi kurang tangguh. Dari delapan gatra yang diukur, ada tiga gatra yang mengalami penurunan, yaitu gatra sumber kekayaan alam, gatra sosial dan budaya, dan gatra ideologi. Dampak globalisasi yang tidak bisa dibendung karena tidak mengenal batas wilayah telah mereduksi rasa nasionalisme di kalangan generasi muda yang kita kenal dengan generasi

³ Ketahanan Nasional

milennial yang semakin memudar. Hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya generasi muda yang saat ini telah berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma bangsa Indonesia. Berbagai permasalahan generasi yang muncul pada saat ini antara lain : menurunnya idealisme bangsa, semangat patriotisme, dan rasa nasionalisme di kalangan masyarakat.⁴

c. Di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebutkan bahwa TNI adalah alat pertahanan negara yang berfungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri, terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, dan pemulih terhadap terganggunya keamanan negara yang akibat kekacauan keamanan. Guna memelihara dan meningkatkan keamanan negara atau keamanan nasional tersebut TNI melaksanakan tugas pokok baik dalam rangka Operasi Militer Untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Untuk Selain Perang (OMSP). Bersamaan dengan upaya tercapainya keamanan nasional tersebut TNI juga memiliki peran dalam memelihara dan meningkatkan ketahanan nasional sebagai upaya penangkalan dengan melaksanakan pemberdayaan wilayah guna membantu pemerintah di wilayah dalam menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini yang meliputi wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya. TNI dan TNI AD pada khususnya melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat dengan sasaran aspek alamiah terdiri dari: Geografi, Demografi dan Sumber daya alam serta aspek dinamis terdiri dari: Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Pertahanan dan keamanan. Dengan terwujudnya keamanan nasional dan ketahanan nasional yang tangguh diharapkan bangsa Indonesia mampu menghadapi setiap bentuk ancaman berupa: perang

⁴ Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional

asimetris, perang hybrid dan perang proksi baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri.

d. Dari ulasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa era globalisasi yang telah membawa pengaruh dan merubah segala lini sendi kehidupan masyarakat di semua belahan dunia sebagai akibat terjadinya kemajuan di bidang teknologi dan informasi serta mengakibatkan hilangnya batas ruang dan waktu yang tidak mengenal batas wilayah telah menelorkan bentuk ancaman baru berupa perang modern yaitu perang asimetris maupun kombinasi dengan bentuk perang yang lainnya seperti perang Hybrid dan Perang Proksi, sehingga perlu adanya ketahanan nasional bangsa Indonesia yang kuat, agar mampu menghadapi segala bentuk ancaman tersebut. TNI sangat berperan dalam upaya memelihara dan meningkatkan ketahanan nasional guna membantu pemerintah. Karena hal ini merupakan fenomena yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia, maka perlu diangkat dalam sebuah tulisan berupa naskah tentang “Analisis Peran TNI Dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional Guna Menghadapi Perang Modern.” Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana ancaman perang modern (Asimetris) terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia?
- 2) Bagaimana kondisi ketahanan nasional bangsa Indonesia saat ini?
- 3) Bagaimana peran TNI dalam upaya memelihara dan meningkatkan ketahanan nasional?

2. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Memberikan gambaran tentang hasil kajian Analisis Peran TNI Dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional Guna Menghadapi Perang Modern.

b. **Tujuan.** Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pimpinan TNI AD dalam merumuskan kebijakan tentang

upaya peningkatan peran TNI guna meningkatkan ketahanan nasional dalam rangka menghadapi perang modern seiring dengan perkembangan globalisasi sebagai dampak kemajuan teknologi informasi yang sedang berkembang saat ini.

3. **Ruang Lingkup dan Tata Urut.** Ruang lingkup kajian ini memuat pelaksanaan penyusunan kajian tentang Analisis Peran TNI Dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional Guna Menghadapi Perang Modern, yang disusun dengan tata urut sebagai berikut:

- a. Pendahuluan.
- b. Latar Belakang Pemikiran.
- c. Data dan Fakta.
- d. Analisa.
- e. Penutup.

4. **Metode dan Pendekatan.**

a. **Metode.** Kajian ini dibuat dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisa data dan fakta yang ada dihadapkan dengan kondisi nyata.

b. **Pendekatan.** Pendekatan dalam kajian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, pengumpulan data dan fakta dari berbagai sumber referensi terkait dengan Peran TNI Dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional Guna Menghadapi Perang Modern.

5. **Pengertian.**

a. Menurut Kozier, peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik.

Peran adalah kombinasi posisi dan pengaruh. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran, kita selalu menulis kata peran tetapi kadang kita sulit mengartikan dan definisi peran tersebut. Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat.⁵

b. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya.⁶

c. Perang modern adalah suatu bentuk perang yang dilakukan secara non militer dari negara maju/asing untuk menghancurkan suatu negara tertentu melalui bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM (Ideologi, Politik, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan). Perang modern dapat pula dikatakan sebagai kontrol dari negara-negara koalisi global yang dimotori oleh negara besar terhadap negara lain yang tidak mengakomodasi kepentingan negara koalisi tersebut atau membahayakan negaranya.⁷

⁵ <http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html>, di unduh pada tgl 23 Jul 2018 jam 16.00

⁶ https://www.academia.edu/15975271/Pengertian_Ketahanan_Nasional_Indonesia

⁷ <https://id.scribd.com/doc/96519500/Ancaman-Perang-Modern>

BAB II

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

6. **Umum.** Ketahanan Nasional sebagai istilah mulai dikenal dan dipergunakan pada permulaan tahun 1960-an. Istilah Ketahanan Nasional untuk pertama kali dikemukakan oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya, pada tahun 1962, mulai diupayakan secara khusus pengembangan gagasan Ketahanan Nasional di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Bandung. Ketahanan Nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan kehidupan nasional untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Dalam pengertian tersebut, Ketahanan Nasional merupakan kondisi kehidupan nasional pada suatu saat tertentu ataupun yang harus diwujudkan. Proses untuk mewujudkan kondisi tersebut memerlukan suatu konsep yang dinamakan konsepsi Ketahanan nasional.

7. **Landasan Pemikiran.**

a. **Landasan Idiil.** Pancasila sebagai landasan Idiil adalah falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dasar dan cita-cita luhur serta tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia. Terkait dengan pembelaan terhadap negara, Pancasila khususnya sila ketiga yang mewajibkan setiap warga negara untuk memiliki rasa persatuan dan kesatuan baik dalam arti ideologi, ekonomi, sosial budaya, memiliki nilai patriotisme, menjunjung tinggi tradisi perjuangan

dan kerelaan untuk berkorban dalam membela bangsa dan negara.

b. **Landasan Konstitusional.** UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, dimana dalam Pembukaan UUD 1945 tertuang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pertahanan negara yang dirumuskan dalam tujuan nasional diantaranya *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”* sebagai kepentingan keamanan⁸, yang juga menjadi Tupok TNI. Sedangkan pada batang tubuh UUD 1945, dinyatakan pasal-pasal tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan pertahanan negara antara lain pada Amandemen kedua ayat 3 Pasal 30 Bab XII Pertahanan dan Keamanan negara, menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara,⁹ menjadi landasan konstitusional TNI Angkatan Darat dalam melaksanakan tugas pokok yang diemban, termasuk tentunya dalam upaya mewujudkan interoperabilitas kecabangan demi mantapnya kesiapsiagaan operasional satuan TNI Angkatan Darat.

c. **Landasan Operasional.**

1) UU RI Nomor 3 Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara. Pada pasal 6, menyebutkan bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.¹⁰ Selanjutnya pada pasal 7, ayat (1) Pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, diselenggarakan oleh

⁸Mabes TNI, Doktrin TNI “Tri Dharma Eka Karma (Tridek)”, hlm. 8.

⁹*Ibid.* hlm 10.

¹⁰Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, hlm 5.

pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara.¹¹ Serta dalam ketentuan umum UU RI No. 3 Tahun 2002, antara lain sebagai berikut:

a) Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

b) Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

2) UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pada pasal 5 menyebutkan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Pasal 6 menyebutkan bahwa:

a) TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:

(1) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap

¹¹*Loc.cit*

kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

(2) Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

b) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Pasal 7, ayat (1) menyebutkan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.¹²

3) Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma, bahwa hakikat TNI adalah dibentuk untuk menyelenggarakan tugas negara di bidang pertahanan dalam menghadapi berbagai ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Selain melaksanakan tugas pertahanan tersebut, TNI juga disiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹³

¹²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, hlm 11.

¹³ Kep Panglima TNI Nomor Kep/555/VI/2018 tentang Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma hal 6.

8. Landasan Teori.

a. Teori peran.

1) Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal di atas, lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh, (Soerjono Soekanto 1987: 220). Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata, (Soerjono Soekanto). Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga

mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.¹⁴ Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

- a) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
- c) Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila

¹⁴ /www.materibelajar.id/2016/01/definisi-peran-dan-pengelompokan-peran.html

seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.¹⁵

2) Menurut Horton dan Hunt (1993), peran (*role*) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status ini oleh Merton (1968) dinamakan perangkat peran (*role set*). Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat (*nature*) dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka di antara orang-orang yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan (*reward*) terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan karena beberapa alasan. Sedangkan, Abu Ahmadi (1982) mendefinisikan peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap

¹⁵<https://www.google.com/search?biw=1366&bih=576&ei=0mJhW-noMtvN-QaOqLmgCg&q=teori+peran+menurut+para+ahli&oq=teori+peran+menurut+pa&gs>

caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.¹⁶ Menurut teori ini, sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario yang disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Dalam skenario itu sudah `tertulis" seorang Presiden harus bagaimana, seorang Gubernur harus bagaimana, seorang guru harus bagaimana, murid harus bagaimana. Demikian juga sudah tertulis peran apa yang harus dilakukan oleh suami, istri, ayah, ibu, anak, mantu, mertua dan seterusnya. Menurut teori ini, jika seseorang mematuhi skenario, maka hidupnya akan harmoni, tetapi jika menyalahi skenario, maka ia akan dicemooh oleh penonton dan ditegur sutradara. Dalam era reformasi sekarang ini nampak sekali pemimpin yang menyalahi skenario sehingga sering didemo publik.

b. **Teori Ketahanan Nasional.** Di dalam pembukaan UUD 1945 cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu mewujudkan suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sedangkan tujuannya membentuk suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum/bersama, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut berperan aktif dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kedilan sosial. Dalam mewujudkan cita-cita nasional tersebut banyak mengalami berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan oleh karena itu perlu adanya upaya yang dilakukan melalui pembangunan kekuatan yang disesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia dan dituangkan dalam bentuk konsep

¹⁶ <https://rinawahyu42.wordpress.com/2011/06/07/teori-peran-rhole-theory/>

geostrategis agar mampu menghadapi permasalahan tersebut yang dikenal dengan istilah Ketahanan Nasional. Ketahanan nasional bangsa Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar untuk menjamin identitas ,integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Ketahanan Nasional perlu dibina secara terus-menerus dan dikembangkan agar kelangsungan hidup bangsa tersebut dapat dijamin. Dalam sejarah perjuangan bangsa, Ketahanan bangsa Indonesia telah teruji, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajahan Jepang, Belanda, menghadapi sparatis RMS, PRRI, Permesta, DI TII, PKI, GAM, Papua Merdeka. NKRI tetap tegak berdiri karena memiliki daya tahan dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG). Sejak bergulirnya reformasi bangsa Indonesia menghadapi permasalahan KKN, krisis moneter, kemiskinan, pengangguran, konflik SARA, pelanggaran HAM, SDM yang rendah, serta globalisasi. Untuk menjamin kelangsungan hidup dalam berbangsa dan bernegara, negara secara terus-menerus senantiasa hadir guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap semua warga negara tanpa diskriminatif, menyediakan fasilitas umum yang memadai yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, menyediakan sarana pendidikan yang memadai dan merata di seluruh tanah air, memberikan biaya pendidikan gratis terhadap seluruh jenjang pendidikan bagi seluruh warga negara, menyediakan infrastruktur serta sarana transportasi yang memadai dan menunjang tingkat perekonomian rakyat,

menyediakan lapangan kerja yang dapat menyerap jumlah angkatan kerja dalam rangka kehidupan yang layak bagi seluruh warga negara, serta mengirimkan pasukan perdamaian dalam rangka ikut serta berpartisipasi aktif dalam menjaga dan memelihara perdamaian dunia.

Konsepsi Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia adalah pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh dan terpadu berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara. Ketahanan Nasional Indonesia merupakan pedoman (sarana) untuk meningkatkan (metode) keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya untuk kemakmuran yang adil dan merata baik secara lahiriah maupun secara rohaniah. Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa dalam melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap tantangan dari luar maupun dari dalam negara. Sedangkan Fungsi Ketahanan Nasional Indonesia berdasarkan tuntutan penggunaannya adalah sebagai: Doktrin Dasar Nasional, Metode Pembinaan Kehidupan Nasional Indonesia dan Pola dasar Pembangunan Nasional. Pemahaman kita tentang Ketahanan Nasional Indonesia yang berfungsi sebagai Doktrin Dasar Nasional adalah untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa, baik yang bersifat inter-regional (wilayah), inter-sektoral maupun multi disiplin. Konsep doktriner ini diperlukan supaya tidak ada cara berfikir yang terkotak-kotak sektoral dan memerlukan upaya secara integral-nasional. Tanpa adanya

Doktrin Dasar Nasional dapat terjadi kesimpangsiuran dalam arah dan tindakan serta tidak konsistennya dengan falsafah yang telah disepakati, sehingga dapat mengakibatkan pemborosan waktu, tenaga dan sarana, serta dapat mengakibatkan terjadinya penyesatan bahkan penyimpangan dari tujuan nasional Indonesia. Fungsi Ketahanan Nasional sebagai Metode Pembinaan Kehidupan Nasional adalah merupakan suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan negara yang dikenal dengan Astagatra, yaitu tiga gatra alamiah (geografi, kekayaan alam dan kependudukan) yang bersifat relatif tetap/statis dan lima gatra sosial (ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan) yang bersifat dinamis. Konsepsi Ketahanan Nasional dalam fungsinya sebagai Pola Dasar Pembangunan Nasional pada hakekatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang dan sektor pembangunan nasional secara terpadu, yang dilakukan sesuai dengan rancangan program pembangunan. Untuk memperkuat Ketahanan Nasional Indonesia, diperlukan langkah-langkah pembinaan dalam tiap gatra, dimana pembinaan ini harus dipahami sesuai dengan asas pembinaan ketahanan nasional Indonesia yang dikembangkan. Dan diharapkan langkah-langkah tersebut dijadikan sebagai kaidah penuntun pembinaannya.

b. **Teori perang asimetris.** Kepopuleran serta kefavoritan perang konvensional yang mengerahkan militer secara terbuka, pasca berakhirnya Perang Dunia II (1939-1945) akhirnya meredup, terutama semenjak Perang Dingin (*Cold War*) usai ditandai dengan jatuhnya Uni Soviet. Muncul beberapa model perang baru sebagai reaksi atas dinamika politik sebelumnya, antara lain *proxy war* (perang boneka, atau perang perwalian) misalnya, atau *hybrid war* (perang kombinasi), *asymmetric*

warfare (perang asimetris), *currency wars* (perang mata uang), dan lain-lain. Beberapa bentuk perang yang sering digunakan saat ini secara prinsip menggunakan cara dan kekuatan yang sama yaitu fisik dan non fisik yang dalam hal ini *symmetric warfare* dan *asymmetric warfare*. Oleh karena itu dalam pembahasan kajian ini langsung ditekankan pada bentuk perang tersebut, sedangkan yang lainnya dilakukan pembahasan namun tidak mendalam. Definisi beberapa sumber sebagai berikut:

- 1) Dewan Riset Nasional (DRN), 2008, Suatu Pemikiran tentang Perang Asimetris (*Asymmetric Warfare*), Jakarta, menerbitkan definisi bahwa perang asimetris adalah suatu model peperangan yang dikembangkan dari cara berpikir yang tidak lazim, dan di luar aturan peperangan yang berlaku, dengan spektrum perang yang sangat luas dan mencakup aspek-aspek astagatra (perpaduan antara trigatra: geografi, demografi, dan sumber daya alam/SDA; dan pancagatra: ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Perang asimetri selalu melibatkan peperangan antara dua aktor atau lebih, dengan ciri menonjol dari kekuatan yang tidak seimbang.
- 2) *US Army War College* menyatakan “Peperangan asimetris dapat dideskripsikan sebagai sebuah konflik dimana dari dua pihak yang bertikai berbeda sumber daya inti dan perjuangannya, cara berinteraksi dan upaya untuk saling mengeksploitasi karakteristik kelemahan-kelemahan lawannya. Perjuangan tersebut sering berhubungan dengan strategi dan taktik perang *unconvensional*. Pejuang yang lebih lemah berupaya untuk menggunakan strategi dalam rangka mengimbangi kekurangan yang dimiliki dalam hal kualitas atau kuantitas.” (Tomes, Robert, Spring 2004, *Relearning*

Counterin surgency Warfare, Parameter, US Army War College).

3) *Australia's Department of Defence*. "Konflik selalu melibatkan satu pihak yang mencari celah keuntungan asimetris atas pihak lainnya dengan cara memperbesar pendadakan, penggunaan teknologi atau metode operasi baru secara kreatif. Sisi asimetri dicari dengan menggunakan pasukan konvensional, khusus dan tidak biasa dalam rangka menghindari kekuatan-kekuatan musuh dan memaksimalkan keunggulan yang dimilikinya. Semua perang kontemporer didasarkan pada pencarian keunggulan asimetris. Asimetri muncul pada saat diketahui adanya perbedaan perbandingan antara dua hal. Asimetri militer dapat diartikan dengan perbedaan tujuan, komposisi pasukan, kultur, teknologi dan jumlah." (*Land Warfare Doctrine 1, 2008, The Fundamentals of Land Warfare, Australia's Department of Defence*).

Dari definisi ketiga sumber di atas memang masih terdapat perbedaan arti, maksud dan makna daripada peperangan non militer serta belum ditemukan definisi yang cocok, pas dan baku. *Australia's Departement of Defence* masih mengaitkan perang nirmiliter dengan perang militer (konvensional), namun lebih menekankan kepada hasil peperangan berupa non militer (kemungkinan yang dimaksud adalah kontrol ekonomi negara lawan, dan penguasaan SDA, dan sebagainya). Demikian juga dengan *US Army War College* masih membandingkan atau mengukur kekuatan antar pihak yang saling bertikai sebagaimana terjadi dalam perang militer secara terbuka.

Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryaccudu mengartikan *asymmetric warfare* sebagai perang non militer atau dalam

bahasa populernya dinamai *smart power* atau perang non konvensional merupakan perang murah meriah, tetapi memiliki daya hancur lebih dahsyat daripada bom atom.

“Asymmetric warfare merupakan perang murah meriah tapi kehancurannya lebih dahsyat dari bom atom. Jika Jakarta di bom atom, daerah-daerah lain tidak terkena tetapi bila dihancurkan menggunakan asymmetric warfare maka seperti penghancuran sistem di negara ini, hancur berpuluh-puluh tahun dan menyeluruh,”

Merujuk diskusi dan rangkuman di atas, diskusi terbatas di Global Future Institute (GFI) Jakarta, pimpinan Hendrajit (24/3/2015) merumuskan definisi *asymmetric warfare* sebagai berikut:

Perang *asimetris* merupakan metode peperangan gaya baru secara nirmiliter (non militer) namun daya hancurnya tidak kalah bahkan dampaknya lebih dahsyat daripada perang militer. Ia memiliki medan atau lapangan tempur luas meliputi segala aspek kehidupan (astagatra). Sasaran perang non militer tak hanya satu aspek tetapi juga beragam aspek, dapat dilakukan bersamaan, atau secara simultan dengan intensitas berbeda. Kelaziman sasaran pada perang asimetris ini ada tiga: (1) belokkan sistem sebuah negara sesuai kepentingan kolonialisme, (2) lemahkan ideologi serta ubah pola pikir rakyatnya, dan (3) hancurkan ketahanan pangan dan *energy security* (jaminan pasokan energinya), selanjutnya ciptakan ketergantungan negara target atas kedua hal tersebut (*food and energy security*). Sedangkan muara ketiga sasaran tersebut senantiasa berujung pada kontrol terhadap ekonomi dan penguasaan SDA sebuah negara, sebagaimana doktrin yang ditebar oleh Henry Kissinger di panggung politik global: “*Control oil and you control nations, control food and you control the people.*” (Kontrol minyak maka anda mengendalikan negara, kendalikan pangan maka anda menguasai rakyat). Betapa efek perang ini sungguh dahsyat karena berdampak selain

kelumpuhan menyeluruh bagi negara dan bangsa juga membutuhkan biaya tinggi dan perlu waktu yang relatif lama untuk proses *recovery* (pemulihan kembali)-nya kelak.

Dari uraian beberapa definisi perang asimetris tersebut di atas pada dasarnya secara keseluruhan sasaran perang berkaitan dengan masalah bangsa dan negara yang meliputi : ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan dan keamanan suatu negara khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan salah satu aspek konsep dasar ketahanan nasional bangsa Indonesia.

9. **Dasar Pemikiran.**

a. Dengan posisi geografis, potensi sumber kekayaan alam serta besarnya jumlah dan kemampuan penduduk yang dimilikinya, Indonesia menjadi ajang persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh negara-negara besar adikuasa. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan dampak negatif terhadap segenap aspek kehidupan nasional dan mempengaruhi bahkan membahayakan kelangsungan hidup dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, Negara Kesatuan Republik Indonesia masih tetap tegak berdiri sebagai satu bangsa dan negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Hal tersebut membuktikan bahwa bangsa Indonesia memiliki keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi setiap bentuk tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan dari manapun datangnya. Dalam rangka menjaga eksistensi bangsa dan negara dimasa kini dan dimasa yang akan datang, bangsa Indonesia harus tetap memiliki keuletan dan ketangguhan yang perlu dibina secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan demikian kondisi

kehidupan nasional merupakan pencerminan ketahanan nasional yang didasari oleh landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945 dan landasan visional wawasan Nusantara.

c. Ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dapat terjadi dari dalam dan luar negeri. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan keuletan, ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Rumusan Ketahanan Nasional sebagai suatu pengertian baku sangat diperlukan dalam menghadapi dinamika perkembangan dunia dari masa ke masa untuk dipakai sebagai dasar atau titik tolak dalam penjabarannya.

BAB III DATA DAN FAKTA

10. **Umum.** Ditinjau dari geopolitik dan geostrategi dengan posisi geografis, sumber daya alam dan jumlah serta kemampuan penduduk telah menempatkan Indonesia menjadi ajang persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh antar negara besar. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak negatif terhadap segenap aspek kehidupan sehingga dapat mempengaruhi dan membahayakan kelangsungan hidup dan ketahanan nasional Indonesia. Untuk itu bangsa Indonesia harus memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga berhasil mengatasi setiap bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

11. Ancaman perang modern (Asimetris) terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Indonesia, skenario perang ini sebenarnya dimulai beberapa waktu sebelum krisis moneter 1997/1998, dimana krisis tersebut sangat cepat berubah menjadi krisis multidimensi yang dampaknya terus dirasakan sampai sekarang. Krisis yang berkepanjangan itu seharusnya menjadi peringatan sekaligus ujian bagi bangsa Indonesia karena terjadi melalui desakan keras dari kekuatan luar agar menerima faham yang dihembuskan dalam kemasan globalisasi, diawali dengan penggoyangan sektor moneter, kemudian meluas ke sektor ekonomi riil dan selanjutnya berkembang menjadi krisis kepercayaan dan krisis politik serta krisis budaya. Kondisi yang tidak stabil tersebut merupakan tujuan dan *grand strategy* dari negara luar yang ingin melemahkan Indonesia secara non konvensional (tanpa menggunakan kekuatan militer). Sadar ataupun tidak, melihat situasi dan kondisi saat ini, sesungguhnya sudah dan sedang berlangsung perang modern di wilayah Indonesia. Kapitalisme internasional yang dipimpin oleh negara

maju dan sekutunya, berusaha mengikis wawasan kebangsaan, berusaha memecah belah persatuan bangsa Indonesia agar lemah dan akhirnya mampu mempengaruhi berbagai kebijakan dan pelaksanaannya untuk tujuan akhir yakni menguasai mayoritas sumber daya alamnya (SDA). Banyak masyarakat Indonesia tidak menyadari bahwa saat ini sedang dijajah dan menjadi korban dari perang modern. Satu alasan pasti bahwa melakukan invasi fisik sangat tidak memungkinkan sehingga mereka merubah konsep dari konvensional menjadi non konvensional (perang modern). Perang modern, dengan biaya yang murah namun hasilnya sangat dahsyat karena dapat merusak sendi-sendi kekuatan negara sasaran. Hal tersebut sangat berbahaya bagi keutuhan wilayah NKRI karena di dalamnya hidup jutaan manusia yang berasal dari berbagai macam elemen suku, agama, ras dan budaya (SARA) sehingga sangat memungkinkan bagi mereka untuk “bermain” guna memecah belah struktur masyarakat yang sangat majemuk.

Faktor utama yang menjadi daya tarik Indonesia menjadi sasaran perang modern adalah kekayaan yang dimiliki Indonesia yang luar biasa besarnya. Dapat dibayangkan jumlah penduduk lebih kurang 230 juta jiwa merupakan pasar yang besar bagi penjualan barang-barang produksi. Berikutnya adalah potensi ekonomi baik dari aspek letak geografis maupun sumber daya alam yang menjadi sasaran tujuan untuk dikuasai sebagai berikut: 40 jt ton lalu-lintas cargo/hari. 21 juta barrel/hari lalu lintas minyak dari Timur Tengah ke Asia Pasifik (Tahun 2030 prediksi meningkat 2x lipat). Produksi ikan dari wilayah Timur dapat memberikan konsumsi hampir separuh penduduk dunia, bila dikelola dengan benar. Hutan sebagai paru-paru dunia. Energi alternatif panas bumi, hydro, solar, angin dan biofuel dari tumbuhan (jarak, sagu, tebu, ubi kayu dan lain-lain), ethanol, alcohol dan lain-lain. Penghasil lada putih No. 1 dunia. Penghasil kayu lapis No. 1 di dunia. Penghasil pulpi dari buah Pala No. 1 di dunia. LNG No. 1 di dunia. Penghasil lada hitam No. 2 di dunia. Penghasil karet alam No. 2 di dunia. Penghasil Minyak Sawit (CPO) No. 2 di dunia. Penghasil timah No. 2 di dunia.

Penghasil tembaga No. 3 di dunia. Penghasil kopi No. 4 di dunia. Jumlah penduduk No. 4 di dunia. Penghasil karet sintetik No. 4 di dunia. Penghasil ikan No. 6 di dunia. Penghasil biji-bijian No. 6 di dunia. Penghasil teh No. 6 di dunia. Penghasil natural gas No. 6 di dunia. Penghasil emas No. 8 di dunia. Penghasil batubara No. 9 di dunia. Penghasil minyak bumi No. 11 di dunia. Negara dengan luas No. 15 di dunia. Penghasil aspal, bauxit, nikel, granit, perak, uranium, marmer, mineral dan penghasil pasir besi kualitas terbaik di dunia. Faktor inilah yang mengundang pihak asing ingin menguasai Indonesia, dengan strategi penguasaan secara tidak langsung yang dibungkus dengan cara mempengaruhi baik cara hidup maupun cara berpikir masyarakat melalui globalisasi komunikasi, media, kebudayaan, ekonomi, keuangan, sosial dan politik.

Dari sisi jumlah penduduk, masyarakat Indonesia didorong agar konsumtif atau menjadi pasar potensial dengan membelanjakan uangnya. Sementara, untuk menguasai sisi potensi sumber daya alamnya, didorong adanya aturan atau kebijakan investasi yang mengikuti atau berpihak kepada pasar bebas yang lebih banyak menguntungkan investor. Sejalan dengan tujuan dari perang modern maka sasaran antaranya adalah melemahnya wawasan kebangsaan serta menghilangkan jati diri dimana berikutnya akan muncul persoalan-persoalan kebangsaan mulai dari pelecehan terhadap negara, tumbuhnya terorisme, penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam oleh pemodal asing, konflik horizontal terutama di masyarakat kelas bawah, korupsi merajalela, perseteruan antar lembaga negara dan banyak lagi contoh persoalan yang memprihatinkan. Termasuk pemanfaatan teknologi informasi khususnya media sosial guna menyebarkan faham radikal yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, dengan sasaran utama adalah generasi milenial yang merupakan generasi penerus bangsa.

Ancaman perang modern terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini baik yang telah terjadi maupun yang sedang berlangsung mencakup berbagai bidang sebagai berikut:

- a. **Ideologi.** Ancaman yang berdimensi ideologi adalah berkembangnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, baik yang berasal dari luar negeri berupa penetrasi faham liberalisme dan komunisme, maupun dari dalam negeri berupa faham anarkis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal dengan alasan keagamaan, golongan fundamental anti kemapanan dan tindakan tidak konstitusional yang bertentangan dengan hukum serta kegiatan aliran sesat. Selain itu juga timbul adanya kecenderungan menguatnya ego kedaerahan dan primordialisme sempit (*ethno-nationalism*).
- b. **Politik.** Ancaman berdimensi politik berupa intervensi politik, dengan menggunakan isu global seperti penegakan HAM, lingkungan hidup, demokratisasi dan penyelenggaraan pemerintahan. Pada ancaman dari dalam negeri yaitu kurangnya tingkat kedewasaan berpolitik yang berujung pada mobilisasi massa atau penggalangan kekuatan politik yang bertujuan melemahkan, menumbangkan pemerintah yang sah dan memisahkan diri dari NKRI.
- c. **Ekonomi.** Ancaman ekonomi yang terjadi saat ini yaitu ketergantungan modal keuangan dan ketergantungan teknologi. Ketergantungan modal keuangan yakni untuk pembangunan ekonomi yang dapat menciptakan kemakmuran bangsa diperlukan investasi dan modal kerja sehingga diperlukan impor modal asing dan pinjaman luar negeri. Sedangkan ketergantungan teknologi terjadi saat mengeksploitasi sumber daya alam dan membangun industri manufaktur guna mengolah hasil perkebunan. Karena perlunya

impor teknologi atau barang modal maka diperlukan pinjaman luar negeri.

d. **Sosial Budaya.** Ancaman berdimensi sosial budaya yaitu penggunaan teknologi informasi yang tidak terkontrol sehingga memicu terjadinya benturan antar peradaban, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan adat ketimuran, munculnya berita *hoax* yang bersifat adu domba antar masyarakat, elit politik, suku, agama, ras dan antar golongan sehingga menimbulkan gejolak dalam kehidupan bermasyarakat serta maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dapat mengancam generasi muda. Disamping itu, dengan kemajuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang saat ini memasuki era Revolusi Industri 4.0, menimbulkan bentuk ancaman yang semakin kompleks, sehingga cara bertindak musuh akan semakin bervariasi dan akurat. Kejahatan memanfaatkan teknologi siber merupakan ancaman yang menggunakan kecanggihan teknologi. Demikian pula kejahatan terorisme melalui siber serta serangan lain yang menggunakan teknologi elektronik yang dapat mengganggu aktivitas kehidupan sosial bangsa.

e. **Pertahanan keamanan.** Ancaman berdimensi pertahanan keamanan yaitu maraknya kasus terorisme akibat pengaruh dari jaringan internasional ISIS dengan merekrut masyarakat Indonesia serta kelompok OPM yang ingin memisahkan diri dari NKRI melalui gerakan bersenjata maupun diplomasi dengan dunia internasional. Tentunya kita tidak ingin lepasnya Timor-Timur dan Sipadan Ligatan terulang kembali di masa yang akan datang.

12. **Kondisi ketahanan nasional bangsa Indonesia saat ini.** Berdasarkan hasil pengukuran kondisi ketahanan nasional yang dilakukan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional Lemhanas

pada tahun 2016, indeks ketahanan nasional Indonesia berada pada angka 2,6 dari rentang 1-5.¹⁷ Artinya, kondisi ketahanan nasional Indonesia dalam posisi kurang tangguh. Adapun indeks 1 menunjukkan ketahanan nasional yang rawan, indeks 2 menunjukkan kurang tangguh, indeks 3 cukup tangguh, indeks 4 menunjukkan tangguh, dan indeks 5 sendiri menunjukkan sangat tangguh. Proses pengukuran indeks tersebut dengan menggunakan dua pendekatan, yakni jenis pendekatan kualitatif yang asalnya dari data kebijakan (*policy*) dan data kuantitatif dari data kinerja dengan memperhatikan pada delapan gatra yang meliputi geografi, demografi dan sumber kekayaan alam sebagai gatra alamiah (*natural determinants*) serta ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan sebagai gatra sosial (*social determinants*).

a. **Geografi.** Secara geografis, Indonesia terletak di antara **Benua Australia** dan **Asia** serta di antara **Samudra Hindia** dan **Samudra Pasifik**. Sedangkan secara astronomis, Indonesia terletak di **6° LU (Lintang Utara)-11° LS (Lintang Selatan)** dan **95° BT (Bujur Timur)-141° BT (Bujur Timur)**. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Selain memiliki letak geografis di atas, Indonesia secara geografis berbatasan dengan negara-negara lainnya. Batas-batas geografis letak Indonesia dengan negara-negara lainnya adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara, berbatasan dengan Malaysia, Singapura dan Filipina.
- 2) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Negara Australia.
- 3) Sebelah Barat, berbatasan dengan Samudera Hindia.

¹⁷ Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional Lemhanas 2016

4) Sebelah Timur, berbatasan dengan Papua Nugini. Letak Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga menimbulkan adanya pelanggaran batas antar negara seperti pelanggaran wilayah perbatasan darat, diantaranya berupa pemindahan titik-titik batas wilayah di Kalimantan Barat, pelanggaran wilayah perbatasan darat yang dilakukan oleh para pelintas batas yang tidak memiliki dokumen yang sah. Pelanggaran perbatasan laut seperti banyaknya kapal-kapal asing tanpa dokumen resmi yang ditangkap di perairan Indonesia baik yang melakukan penangkapan ikan, penambangan atau pengapalan kayu-kayu glondongan.

b. **Demografi.** Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 berdasarkan data dari BPS adalah 265 juta orang, terdiri dari 133,17 juta jiwa laki-laki dan 131,88 juta jiwa perempuan, dengan penyebaran penduduk menurut pulau-pulau besar adalah: pulau Sumatra yang luasnya 25,2 % dari luas seluruh wilayah Indonesia dihuni oleh 21,3 % penduduk, Jawa yang luasnya 6,8 % dihuni oleh 57,5 % penduduk, Kalimantan yang luasnya 28,5 % dihuni oleh 5,8 % penduduk, Sulawesi yang luasnya 9,9 % dihuni oleh 7,3 % penduduk, Maluku yang luasnya 4,1 % dihuni oleh 1,1 % penduduk dan Papua yang luasnya 21,8 % dihuni oleh 1,5 % penduduk. Pada umumnya mereka bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 49,79 % dan di daerah perdesaan sebanyak 50,21 %. Dari segi kependudukan, Indonesia masih menghadapi beberapa masalah besar antara lain :

1) Angka kelahiran yang tinggi sangat rentan terhadap kemungkinan terjadinya permasalahan di masa yang akan datang apabila tidak seimbang dengan pemenuhan kebutuhan sandang, papan, pangan, energi,

kesempatan kerja, kesehatan, pendidikan dan hak dasar lainnya.

2) Penyebaran penduduk yang tidak merata juga dapat menimbulkan beberapa permasalahan antara lain : Terjadinya kesenjangan sosial ekonomi dimana beberapa daerah mempunyai pendapatan yang tinggi sedangkan daerah yang lain mempunyai pendapatan yang rendah, tidak meratanya pembangunan beberapa daerah mengalami pembangunan yang pesat sedangkan ada daerah yang terhambat pembangunannya karena kekurangan penduduk dan tenaga kerja, munculnya masalah pengangguran di daerah perkotaan sedangkan daerah pedesaan kekurangan tenaga kerja.

c. **Sumber Daya Alam.** Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut lebih luas dibandingkan wilayah daratannya. Saat ini kita memiliki wilayah laut (termasuk ZEE) seluas 5,8 juta km². Wilayah laut seluas itu sama dengan tiga per empat dari total luas wilayah Indonesia. Di dalam wilayah Indonesia, terdapat 17.504 pulau besar dan kecil, yang dikelilingi pantai dengan garis pantai sepanjang 95.200 km. Garis pantai sepanjang ini merupakan yang terpanjang ke dua di dunia setelah Kanada. Data dan fakta tersebut membuat Indonesia selama ini dikenal sebagai negara maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia dan sekaligus menunjukkan kekayaan Indonesia. Sumber daya alam (SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Beraneka ragam sumber daya alam di wilayah darat Indonesia baik yang bersifat dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui seperti: tanah, air, hutan, tambang (minyak bumi, batubara, gas alam), perikanan dan lain sebagainya. Di wilayah laut tersebut terkandung kekayaan alam yang berlimpah-ruah dan beragam.

Kekayaan alam itu antara lain berupa sumber daya alam yang terbarukan dan tak terbarukan, serta jasa-jasa lingkungan kelautan. Sumber daya alam yang terbarukan itu antara lain perikanan, terumbu karang, rumput laut, hutan mangrove, dan lain-lain. Sumber daya alam yang tak terbarukan yang kita punya antara lain minyak dan gas bumi yang terkandung di bawah permukaan laut, bijih besi, timah, bauksit, dan sumber-sumber mineral lain. Selain itu, laut kita yang luas juga mengandung potensi geoekonomi yang besar seperti jasa-jasa lingkungan laut, antara lain transportasi laut dan pariwisata bahari serta energi kelautan yang sangat besar potensinya untuk dikembangkan misalnya tenaga arus laut, angin, maupun gelombang. Semua itu jika dapat kita kelola dengan baik, merupakan sumber-sumber kekayaan negara yang dapat dioptimalkan untuk mendatangkan hasil yang besar bagi kemakmuran negara dan rakyatnya.¹⁸ Inovasi teknologi, kemajuan peradaban dan populasi manusia, serta revolusi industri telah membawa manusia pada era eksploitasi sumber daya alam sehingga persediaannya terus berkurang secara signifikan, terutama pada satu abad belakangan ini. Sumber daya alam mutlak diperlukan untuk menunjang kebutuhan manusia, tetapi sayangnya keberadaannya tidak tersebar merata dan pengelolaan sumber daya alam tersebut seringkali tidak sejalan dengan perkembangan ekonomi.¹⁹

d. **Kondisi Sosial.**

- 1) Ketahanan di bidang Ideologi. Pasca reformasi Indonesia mengalami peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi, masyarakat menjadi lebih terbuka dengan

¹⁸ Bambang Haryanto, 13 April 2013 Indonesia butuh wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

¹⁹ Internet Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas tentang sumber daya alam.

beragam ideologi yang berasal dari luar, sehingga dirasakan ada kemerosotan ketahanan di bidang ideologi. Ketahanan di bidang ideologi menurun dengan adanya indikasi timbulnya beberapa permasalahan seperti radikalisme dan intoleransi. Di sisi lain masyarakat mengalami euforia reformasi dan menentang segala hal yang berbau Orde Baru. Masalah ini juga menjadi semakin bersifat kompleks akibat dampak globalisasi dimana lalu-lintas ideologi terjadi tanpa mengenal batas negara. Berbagai peristiwa yang terjadi di wilayah dan bersifat rahasia telah mewarnai isu yang menyeruak dalam kehidupan masyarakat. Kata radikal yang berarti secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip) amat keras menuntut perubahan (undang-undang pemerintah dan sebagainya) dan maju dalam berfikir atau bertindak. Di Indonesia paham radikalisme dikelompokkan menjadi dua yaitu: radikal kanan yang berhaluan agama dan radikal kiri yang berhaluan komunis.

a) Radikal Kiri. Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia merupakan pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, dan larangan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme. Perkembangan radikal kiri terutama PKI merupakan organisasi terlarang berhaluan kiri yang mengembangkan ideologi komunis dimana apabila kita melakukan refleksi bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) pernah melakukan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara yaitu peristiwa Madiun atau Madiun Affairs pada tahun 1948 dan

pemberontakan tahun 1965 yang dikenal dengan nama G 30 S/PKI melalui konsep Nasakom. Pada akhir-akhir ini mulai eksis dengan adanya bukti-bukti: kemunculan kaos berlambang palu arit yang memang identik dengan PKI hingga *recto verso* yang disebutkan sebagai pengaman dalam mata uang rupiah yang menyerupai lambang palu arit. Media cetak dan media sosial juga dimanfaatkan oleh kelompok mereka yaitu dengan munculnya akun *fans page* PKI @NeoPKI sekitar tanggal 23 Januari 2017. Salah satu postingnya yang mengerikan adalah “Target kami selanjutnya yaitu membunuh perwira TNI, membunuh ulama, pendeta, biksu dan membuang mayatnya di sumur tua. Membakar masjid, gereja, kuil, wihara. Membakar al-qur’an, injil, wreda dan tripitaka. Membunuh siapa saja yang menyembah Tuhan.” (Partai Komunis Indonesia @NeoPKI, 27 Januari 2017). Mereka berupaya memutar balikan fakta dengan cara mempengaruhi pikiran generasi muda dengan menyampaikan bahwa seolah-olah PKI adalah korban. Buku-buku yang berisi tentang komunis-marksisme beredar dan dijual bebas di tempat umum tanpa ada keraguan sedikitpun. Perjuangan untuk mendapat simpati dan dukungan dari masyarakat internasional di forum internasional juga telah dilakukan KGB yaitu dengan penyelenggaraan konferensi dan pameran foto di beberapa negara Eropa. Selain itu, menguatnya pergerakan KGB sangat nyata dengan keterlibatan beberapa tokoh pengacara Nursyahbani, Katjasungkana dan Todung Mulya

Lubis yang mengajukan sidang dengar pendapat kasus PKI di Den Haag dalam sidang *International People's Tribunal* (IPT) '65 terkait tragedi 1965. Gerakan komunis dewasa ini berpotensi menimbulkan ancaman bagi ideologi negara Pancasila serta dapat menimbulkan gejolak politik dan keamanan. Kebangkitan dan perkembangan komunis gaya baru (KGB) telah menjadi ancaman asimetrik dengan *strategy soft power* seperti diulas oleh Basil H. Liddell dalam Buku *Strategy* menjelaskan bahwa ancaman asimetrik menyerang pikiran, membengkokkan itikad, memelintir logika, menghasut keyakinan dan meruntuhkan kepercayaan. Pernyataan ini identik dengan upaya dan langkah yang dilakukan kelompok yang mengatasnamakan gerakan KGB dalam memperjuangkan tujuan dan cita-citanya. Komunisme bangkit dengan cara lebih halus dan menyusup kemana-mana bersifat asimetrik dengan *strategy soft power*. Indikasi yang ada bahwa banyak aktivis, tokoh, politisi, bahkan akademisi, baik dengan sadar atau tanpa sadar mendukung bangkitnya komunis Indonesia dengan membonceng isu HAM dan demokratisasi serta memanfaatkan media sosial sebagai alat yang paling efektif. Sebagai bahaya laten yang bersifat asimetrik, KGB merupakan Neo Komunis yang memiliki tujuan untuk membangkitkan kembali anasir komunis. Modus perjuangannya mengusung isu kemiskinan dan kebodohan, menghabisi korupsi, penegakan hukum, ketidakadilan di berbagai bidang dan menjadi terdepan

untuk membela rakyat. Dalam konteks Ketahanan Nasional keberadaan KGB nampaknya sebagai sesuatu yang lumrah, namun strategi *soft power* gerakan ini merupakan ancaman, sehingga perlu penangkalan melalui upaya yang lebih sistematis oleh para *stakeholders* pemerintah terutama dalam mendeteksi setiap pergerakan dan aktifitasnya.

b) Radikal kanan. Radikal kanan adalah istilah yang mengacu kepada segmen spektrum yang biasanya dihubungkan dengan konservatisme, liberalisme klasik, kelompok kanan agama, atau sekedar lawan dari sayap kiri. Ancaman fundamentalisme agama tidak hanya sekedar ancaman “penyakit nalar” seseorang dalam melihat sesuatu, akan tetapi lebih jauh dari itu. Di Jakarta pada tahun 1998 misalnya didirikan organisasi Laskar Pembela Islam (FPI) yang dipimpin oleh Muhammad Rizieq Shihab dan aktivitas utamanya adalah melakukan serangan secara fisik ke “tempat-tempat maksiat” menurut kacamata ideologi mereka. Tindakan main hakim sendiri ini dapat dinilai bahwa mereka telah melakukan kekerasan tanpa dasar hukum negara atas penegakan syariat Islam.

2) Ketahanan di bidang politik. Politik berasal dari kata *politics* atau *policy* artinya berbicara. Politik akan mengandung makna kekuasaan pemerintahan atau juga kebijaksanaan. Hubungan tersebut tercermin dalam fungsi pemerintahan negara sebagai penentu kebijaksanaan serta aspirasi dan tuntutan masyarakat sebagai tujuan yang ingin

diwujudkan sehingga kebijaksanaan pemerintahan negara itu sudah seharusnya serasi dan selaras dengan keinginan dan aspirasi masyarakat. Beberapa ancaman politik yang berasal dari dalam negeri yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Pendidikan Moral dan Sosial (Pusat Pendidikan Moral dan Sosial : 3 Januari 2018).

a) Korupsi. Korupsi merupakan salah satu ancaman yang berasal dari dalam negeri sendiri. Seperti yang kita ketahui jika di Indonesia sendiri masih terdapat aparat pejabatnya yang menyalahgunakan kekuasaan mereka hanya demi mencari keuntungan semata untuk keuntungan pribadi dengan cara korupsi. Korupsi yang mereka lakukan tersebut sangat merugikan bangsa karena uang tersebut adalah uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur negara, sehingga berakibat pada pembangunan yang ada di Indonesia menjadi sedikit terganggu. Hal ini bisa menghambat kemajuan bangsa apabila merugikan negara dalam jumlah yang besar.

b) Konflik SARA yang dikaitkan dengan politik. Negara Indonesia merupakan negara yang majemuk karena memiliki aneka ragam suku, agama, ras, dan antar golongan. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan tersendiri yang senantiasa harus terus dan tetap dipelihara kelestariannya guna memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Patut kita syukuri karena bangsa Indonesia memiliki sikap Pluralisme yaitu sikap untuk menerima keberagaman (pluralitas) tersebut dengan hidup secara toleran dalam masyarakat yang plural itu sendiri. Hal ini sesuai

dengan semboyan dan sebagai semangat pluralisme bangsa Indonesia yaitu "Bhineka Tunggal Ika" yang memiliki makna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan, Indonesia mengakui adanya pluralitas bangsa yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Dalam kehidupan bernegara semua telah diatur dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku sehingga diharapkan kehidupan bangsa Indonesia dapat dicapai kehidupan yang sesuai dengan norma yang telah ditentukan. Kenyataan di dalam kehidupan masyarakat masih terjadi konflik-konflik yang semula merupakan konflik antar agama namun setelah dilakukan penelitian secara mendalam sebenarnya ada oknum masyarakat yang memanfaatkan perbedaan tersebut untuk kepentingan dan keuntungan politik seperti yang terjadi di : Ambon, Sampit di Kalimantan tengah, dan Maluku. Seharusnya tidak boleh terjadi karena resikonya yang sangat berat dan dapat berakibat terjadinya perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

c) Penurunan paksa pemerintahan. Masalah atau ancaman politik yang berasal dari dalam negeri bisa juga terjadi akibat terjadinya penurunan paksa pemerintahan. Peristiwa penyerahan jabatan Presiden dari Soekarno kepada Soeharto pada tahun 1967 walaupun tidak secara eksplisit menyatakan bahwa hal itu merupakan penurunan paksa pemerintah walaupun bersifat perorangan.

Kasus lain yang merupakan upaya penurunan paksa pemerintahan yaitu masyarakat Indonesia berusaha menurunkan presiden Soeharto dari jabatannya. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat terjadi di waktu mendatang bila jalannya roda pemerintahan tidak sesuai dengan harapan rakyat. Kejadian penurunan paksa suatu pemerintahan itu merupakan salah satu bentuk ancaman politik yang bisa terjadi di dalam negeri, karena banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan seperti: krisis ekonomi, sistem pemerintahan yang berjalan kurang normal serta munculnya berbagai kerusuhan.

d) Isu-isu politik /Hoaks. Berita palsu atau berita bohong atau hoaks adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Data dari Kemenkominfo menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu. Internet telah salah dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya dengan cara menyebarkan konten-konten negatif yang menimbulkan keresahan dan saling mencurigai di masyarakat. Penyebaran berita atau informasi hoaks, menjadi isu yang berbahaya dalam hidup berbangsa dan bermasyarakat. Isu Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) hingga ujaran kebencian menjadi materi berbahaya dalam penyebaran berita hoaks, terutama memasuki tahun politik menjelang pemilu 2019.

e) Pelanggaran HAM. HAM, demokrasi, lingkungan hidup, dan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan merupakan barometer dalam mengukur keberhasilan bagi pemerintahan suatu negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu HAM juga menjadi salah satu instrumen yang penting bagi Indonesia, karena HAM merupakan hak yang melekat pada setiap warga negara dan sifatnya adalah mutlak. HAM juga merupakan salah satu instrumen yang wajib dalam politik dan harus sangat dihargai dan dijunjung tinggi. Sehingga jika terjadi pelanggaran HAM di sebuah negara, maka itu juga bisa menjadi ancaman karena HAM sendiri merupakan salah satu pandangan dari politik.

3) Ketahanan di bidang ekonomi. Ketahanan ekonomi merupakan suatu kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan dan dinamika perekonomian baik yang datang dari dalam maupun dari luar negara dan secara langsung maupun tidak langsung menjamin kelangsungan dan peningkatan perekonomian bangsa dan negara. Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, menciptakan kemandirian ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi, dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang secara adil dan merata. Dengan demikian, pembangunan ekonomi diarahkan kepada mantapnya ketahanan ekonomi melalui suatu iklim usaha yang sehat

serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, tersedianya barang dan jasa, terpeliharanya fungsi lingkungan hidup serta meningkatnya daya saing dalam lingkup perekonomian global. Iklim ekonomi global berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, meskipun demikian ketahanan Indonesia bidang ekonomi sudah cukup baik.

"Indonesia sudah teruji memiliki ketahanan ekonomi yang cukup baik walaupun juga terpengaruh iklim ekonomi global,"

"Kami tidak kebal terhadap apa yang terjadi pada ekonomi global dan perkembangan geopolitik juga mempengaruhi perbaikan harga komoditas," (Sri Mulyani : 17 Oktober 2017).

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pengangguran terbuka di Indonesia per Agustus 2018 turun jika dibandingkan dengan Agustus 2017. Angka pengangguran terbuka per Agustus 2018 sebesar 5,34% atau setara 7,001 juta orang artinya turun dari 5,50% menjadi 5,34%. Jumlah penduduk usia kerja di Indonesia sebanyak 194,78 juta orang. Rinciannya 131,01 juta merupakan angkatan kerja dan 63,77 juta orang bukan angkatan kerja. Selanjutnya dari total 131,01 juta orang itu, yang bekerja sebanyak 124,01 juta orang, sedangkan 7,001 juta orang pengangguran.

4) Ketahanan di bidang sosial. **Ketahanan sosial** adalah suatu kondisi yang dinamis dari suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar secara langsung maupun tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integrasi, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan

perjuangan nasional. Ketahanan sosial juga menggambarkan kemampuan bertahan di tingkat sistem lokal dari arus globalisasi dan desentralisasi. Beberapa permasalahan bidang sosial antara lain :

- a) Budaya hedonisme yang tinggi. Budaya Barat tidak hanya memiliki dampak positif di dalamnya, namun mereka juga memiliki budaya negatif yang patut dihindari masyarakat kita salah satunya adalah budaya hedonisme atau suka jalan-jalan dengan perilaku konsumtif. Budaya ini seiring berjalannya waktu semakin disukai oleh remaja Indonesia. Mereka lebih suka untuk berjalan-jalan atau *hang out* bersama teman-temannya dibandingkan belajar di rumah pada malam hari.
- b) Pola berpakaian yang semakin minim. Jika dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, saat ini kita lebih sering menjumpai remaja perempuan menggunakan pakaian yang serba mini seperti memakai *hotpants* dan *tanktop*. Seakan-akan budaya memakai pakaian mini yang lebih menonjolkan bagian tubuh terutama kaki saat ini sudah dianggap lumrah oleh mereka, padahal yang namanya pikiran laki-laki terhadap wanita yang memakai pakaian mini dari dulu sampai saat ini sama saja.
- c) Menurunnya sikap sopan santun terhadap orang lain. Budaya leluhur Indonesia yang sangat memegang budaya sopan santun antar satu sama lain terutama dengan orang yang lebih tua dari kita haruslah tetap dilestarikan. Budaya tersebut dapat membatasi diri kita dari perbuatan semena-mena

antar satu sama lain dan kita bisa lebih menghargai pendapat orang lain. Namun dengan mencontoh budaya Barat, banyaknya remaja yang sudah tidak terlalu mempedulikan hal tersebut. Contohnya saja, saat ada remaja berjalan melewati orang tua sedang duduk, tak jarang kita menemukan bahwa sebagian dari remaja tidak menundukan badan ataupun kepala saat berjalan. Bahkan ada beberapa yang tidak menoleh sedikitpun terhadap apa yang dilewatinya.²⁰

d) Wawasan kebangsaan rapuh. Rapuhnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di tengah-tengah masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan arus globalisasi khususnya generasi muda yaitu ditandai dengan derasnya arus informasi dan teknologi, sehingga memberikan pengaruh terhadap cara dan pola pandang generasi muda terhadap nilai-nilai kebangsaan. Demikian juga peristiwa konflik di masyarakat dan masuknya paham aliran sesat di tengah-tengah masyarakat juga rentan terhadap menurunnya nilai-nilai kebangsaan.

5) Ketahanan di bidang pertahanan dan keamanan. Terjadinya berbagai gejolak di tanah air menandakan bahwa kondisi ketahanan nasional di bidang pertahanan dan keamanan masih belum tangguh. Gejolak di berbagai wilayah Indonesia serta ancaman yang terjadi adalah sebagai berikut:

²⁰ Kompasiana , Internet 22 April 2019 tentang degradasi moral

a) Terorisme. Terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, yang jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintah dan mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan. Terorisme yang terjadi ini bisa menyebabkan ketidakstabilan sebuah negara, mengguncang ekonomi dan juga kondisi sosial budaya masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Tragedi serangan teror yang terjadi di Indonesia dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut²¹:

- (1) Bom Thamrin yang terjadi di kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016.
- (2) Bom Mapolresta Solo, Jawa Tengah pada hari Selasa 5 Juli 2016.
- (3) Bom Molotov di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat pada tanggal 13 dan 14 November 2016.
- (4) Bom Terminal Bus Kampung Melayu Jakarta Timur, pada Rabu malam 24 Mei 2017.
- (5) Tragedi Mako Brimob pada Selasa malam 8 Mei 2018.
- (6) Bom Gereja Surabaya pada hari Minggu, 13 Mei 2018.

²¹ <https://news.okezone.com/read/2018/05/14/337/1897942/7>

(7) Bom Sidoarjo pada tanggal 13 Mei 2018.

- b) Narkoba. Narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) adalah bahan/zat yang dapat memengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

Menurut UU RI No 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Harus diakui saat ini, salah satu persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa lainnya di dunia adalah seputar maraknya penyalahgunaan narkoba, yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Saat ini, jutaan orang telah terjerumus ke dalam 'lembah hitam' narkoba. Dan ribuan nyawa telah melayang karena jeratan 'lingkaran setan' bernama narkoba. Telah banyak keluarga yang hancur karenanya. Tidak sedikit pula generasi muda yang kehilangan masa depan karena perangkap 'makhluk' yang disebut narkoba ini. Jika narkoba sudah dikirim dengan jumlah berton-ton, itu bukan lagi namanya penyelundupan, tapi

pengeboman kepada sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Diperkirakan sekitar kurang lebih 5 ton sabu senilai Rp. 10 triliun berhasil diamankan aparat pada tahun 2018 lalu hanya dengan jarak selang hitungan hari. Kasus tangkapan pertama 1 ton di Batam, tangkapan kedua 1,6 ton juga di Batam dan ketiga sekitar 3 ton. Berdasarkan informasi dari Kepala BNN beberapa waktu lalu, diduga masih ada sekitar 600 ton bahan baku sabu berkualitas tinggi yang mau masuk ke Indonesia.²²

c) Gerakan Separatis Bersenjata. Gerakan separatis adalah gerakan yang bersifat mengacau dan menghancurkan yang dilakukan oleh gerombolan pengacau yang bertujuan untuk memisahkan diri dari ikatan dengan suatu negara.²³ Di Indonesia, gerakan separatis mulai muncul pada awal kemerdekaan sampai dengan saat ini. Kasus terakhir yaitu adanya penembakan tiga puluh satu pekerja PT. Istaka Karya yang tengah membangun jembatan di Distrik Yali, Kabupaten Nduga, Papua ditembak mati pada hari Minggu, 2 Desember 2018 lalu. Kuat dugaan pelaku pembantaian itu adalah kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), kelompok sipil bersenjata di Papua yang kerap dipersepsikan sebagai organisasi separatis. Konon, para pekerja itu ditembaki karena merekam aktivitas upacara

²² <https://tniad.mil.id/2018/03/ancaman-narkoba-kepada-generasi-bangsa/>

²³ <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-separatis/>

peringatan hari kelahiran OPM yang diperingati setiap tanggal 1 Desember.

d) Konflik komunal. Konflik komunal adalah terjadinya pergeseran nilai dan disintegrasi norma yang kecenderungan membangkitkan disharmoni (tidak kesesuaian) sehingga mengarah ke kegiatan dihedritasinya (alih fungsi) kepercayaan kepada identitas komunal. Identitas kelompok, etnisitas bangsa, identitas sosial budaya, identitas kepercayaan dan simbol-simbol orang tertentu yang menjalankan arah kebijakan yang dianggap fleksibelitas sehingga sering menyebabkan retaknya hubungan antar komunal di masyarakat.²⁴ Secara sederhana, konflik komunal dapat diartikan pula sebagai konflik yang terjadi antar komunitas/kelompok/massa dalam jumlah banyak. Kelompok itu dapat berasal dari etnis, suku dan agama yang berbeda. Beberapa kasus konflik komunal yang terjadi di Indonesia antara lain sebagai berikut:

(1) Konflik Poso. Konflik ini timbul saat terjadi perebutan kekuasaan Bupati di Poso bersamaan dengan momentum Natal dan Ramadhan. Melalui momentum tersebut, ada pihak-pihak yang menggunakannya untuk tujuan politik dengan memanfaatkan perkelahian dua pemuda yang berbeda agama.

(2) Konflik Maluku dan Maluku Utara. Peristiwa ini merupakan konflik kekerasan yang dilatarbelakangi perbedaan agama

²⁴ <https://brainly.co.id/tugas/2488503>

yaitu antara kelompok Islam dan kelompok Kristen.

(3) Konflik Sampit. Peristiwa ini merupakan konflik antara kelompok etnis Dayak dan Madura, yang berawal dari tewasnya 4 orang pemuda etnis Madura dan diduga pelakunya adalah dari etnis Dayak, sehingga terjadilah konflik yang melibatkan 2 etnis tersebut.

13. Peran TNI dalam upaya memelihara dan meningkatkan ketahanan nasional. Dalam upaya mewujudkan ketahanan nasional, maka TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi yang diimplementasikan melalui peran sebagai berikut:

a. **Sebagai kekuatan pertahanan.** TNI sebagai alat pertahanan negara memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan UU bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.²⁵ TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:²⁶

- 1) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
- 2) Penindak terhadap setiap bentuk ancaman.

²⁵ UU RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 5

²⁶ UU RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 6

3) Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

b. **Sebagai kekuatan moral.** TNI sebagai kekuatan moral berperan sebagai pendeteksi ancaman non-militer (apabila komponen sipil kurang waspada terhadap ancaman tersebut) berkoordinasi dengan Lembaga Pemerintah atau Departemen yang berwenang sebagai unsur utama (sesuai UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara) yang diaplikasikan dalam bentuk deteksi dini terhadap kemungkinan masuknya ancaman di bidang ideologi (Liberal, Khilafah Islamiah, Komunis Gaya Baru), politik (politik demokrasi liberal dan demokrasi lain yang tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila), ekonomi (sistem Kapitalis Liberal), sosial budaya (disorientasi tujuan, paham materialisme, konsumerisme, hedonisme, permisivisme, individualisme dan lain-lain). Hal ini bertujuan agar ancaman di bidang Ipoleksosbud tidak memasuki atau merasuki ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dapat mengancam kedaulatan dan keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

c. **Sebagai kekuatan kultural.** TNI sebagai kekuatan kultural memiliki kewajiban untuk memelihara semangat dan mempertahankan kultur serta nilai-nilai luhur bangsa Indonesia baik di dalam tubuh TNI sendiri maupun di dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kesadaran untuk membela Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak kenal menyerah dalam rangka menyelamatkan dan memelihara keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

BAB IV ANALISA

14. **Umum.** Dari semua data yang sudah diperoleh selanjutnya dilakukan analisa tentang perang modern, ketahanan nasional dan peran TNI dalam meningkatkan ketahanan nasional guna memperoleh suatu hasil pemikiran yang integral dan komprehensif.

15. **Ancaman perang modern (Asimetris) terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.** Menurut Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu, perang generasi keempat atau *fourth generation warfare* disebut juga sebagai perang asimetris, yaitu suatu perang modern tanpa keterlibatan militer secara formal atau bisa juga disebut perang sipil (*civil war*). Dalam bahasa populernya dikenal dengan sebutan *smart power* atau perang non militer. Perang sipil yang murah meriah tetapi memiliki daya hancur yang sangat dahsyat. Jika Jakarta dibom atom, daerah-daerah lain tidak terkena dampaknya. Tetapi bila dihancurkan dengan menggunakan *asymmetric warfare* sama artinya dengan penghancuran sistem di negara ini, hancur berpuluh-puluh tahun dengan akibat menyeluruh. Ungkap Menhan Ryamizard dalam forum diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh Global Future Institute.²⁷ Dengan kata lain, perang modern yaitu suatu bentuk perang yang dilakukan secara nirmiliter dari negara maju atau asing untuk menghancurkan suatu negara tertentu melalui bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Perang ini adalah bentuk kontrol dari negara-negara koalisi global, biasanya dimotori oleh salah satu negara kuat terhadap negara lain, yang mana negara itu dianggap tidak mengakomodir kepentingan negara koalisi dan dianggap membahayakan kepentingan negara koalisi. Tujuan dari perang modern yaitu: mengeliminir kemampuan negara sasaran agar tidak menjadi sebuah potensi ancaman negara

²⁷ M.Arief Pranoto – Mengenal Perang Asimetris: Sifat, Bentuk, Pola dan Sumbernya. 6 April 2015.

koalisi, melemahkan kemampuan negara sasaran sehingga semakin tergantung dan agar lebih mudah untuk ditekan oleh negara koalisi serta menguasai secara total negara yang menjadi sasaran oleh negara koalisi.

Sedangkan tahapan dari Perang Modern yaitu: *Pertama*, Tahap Infiltrasi. Dalam tahap ini dilakukan sebuah infiltrasi melalui bidang-bidang seperti intelijen, militer, pendidikan, ekonomi, ideologi, politik, sosial budaya atau kultur dan agama, bantuan-bantuan, kerjasama diberbagai bidang, termasuk penggunaan media dan informasi. *Kedua*, Tahap Eksploitasi. Dalam tahap ini dilakukan eksploitasi dengan melemahkan dan menguasai bidang-bidang seperti intelejen, angkatan bersenjata, ekonomi, politik, budaya dan ideologi, termasuk pendidikan, dimana semua ini sebenarnya adalah titik berat dari kekuatan suatu negara. *Ketiga*, Tahap Politik Adu Domba. Dalam tahap ini dilakukannya politik adu domba. Hal ini dilakukan untuk menimbulkan kekacauan ataupun kekerasan, konflik horizontal (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan). Berikutnya bertujuan agar muncul keinginan memisahkan diri dari NKRI atau tindakan separatisme. Biasanya dimulai dengan eskalasi pemberontakan dan pada akhirnya terjadi pertikaian antar anak bangsa dan perang saudara. *Keempat*, Tahap Cuci Otak (*Brain Wash*). Dalam tahap ini mereka mempengaruhi paradigma berfikir masyarakat, yakni paradigma kebangsaan (nasionalisme) menjadi cara pandang yang universal dengan keutamaan isu-isu global, semisal demokratisasi dan HAM ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. *Kelima*, Tahap Invansi. Dalam tahap ini, ketika Wawasan Kebangsaan suatu negara yang menjadi sasaran telah hancur dan jati diri bangsa menjadi hilang, maka praktis negara yang menjadi sasaran telah dapat dikuasai, atau negara sasaran dalam kondisi penguasaan dan terjajah dalam segala aspek kehidupan. Berikutnya, tinggal membuat negara boneka yang diwakili oleh para komprador.

Jika melihat dari kelima fase perang modern tersebut dihadapkan dengan kondisi IPOLEKSOSBUDHANKAM saat ini, sadar ataupun tidak sadar, saat ini telah terjadi perang modern di Indonesia, dengan menjalankan strategi sesuai dengan Perang Modern yang dijelaskan sebelumnya. Kapitalisme internasional yang dipimpin oleh negara maju beserta koalisi berusaha untuk mendegradasi Wawasan Kebangsaan, memecah persatuan bangsa agar lemah dan akhirnya akan mempengaruhi berbagai keputusan penyelenggara negara, termasuk pada tujuan akhirnya yaitu menguasai mayoritas sumber daya alam.

Perlu diketahui, bahwa untuk melakukan perang dengan cara konvensional (pengerahan kekuatan militer) dianggap tidak memungkinkan lagi, sehingga alasan untuk mengubah perang secara konvensional ke perang nonkonvensional (Perang Modern) menjadi cukup beralasan, selain biaya yang dikeluarkan jauh lebih murah. Analoginya, dengan kemampuan pasukan dan teknologi persenjataan canggih yang dianggap berimbang, apabila dua negara kuat berperang, maka kedua negara tersebut akan sama-sama mengalami kehancuran, sehingga mereka sama-sama akan berfikir dua kali untuk meluncurkan serangan secara berhadap-hadapan. Kenyataan tersebut mengharuskan adanya penggunaan *grand strategy* dari negara yang memiliki nafsu imperialisme guna menghindari perang dengan menggunakan cara-cara perang konvensional.

Biasanya, dampak dari Perang Modern lebih dahsyat dari perang konvensional, karena negara sasaran akan dihancurkan secara sistemik dan akhirnya negara sasaran tidak eksis lagi menjadi negara bangsa. Sebagai perbandingan, bisa kita lihat bagaimana Uni Soviet dihancurkan dengan cara Perang Modern dan bagaimana Jepang dihancurkan dengan cara perang konvensional. Uni Soviet hancur dan Jepang dapat bangkit kembali. Lalu, apa yang menarik bagi negara-negara koalisi untuk menguasai Indonesia? Yang jelas, faktor utama yang menjadi daya pikat Indonesia untuk harus dikuasai adalah karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa besarnya, jumlah

penduduknya yang begitu besar sehingga dapat menjadi pasar yang potensial bagi berbagai macam produk serta letak geografisnya yang begitu sangat strategis. Faktor-faktor inilah yang menjadi alasan mengapa Indonesia harus dikuasai. Perang untuk menguasai sebuah bangsa merupakan perwujudan dari adanya nafsu imperialisme. Nafsu imperialisme mungkin akan terus ada dimuka bumi, karena adanya sifat serakah yang melekat pada manusia. Jika sifat serakah ini tidak terkontrol, maka kemungkinan berkembang untuk menguasai suatu bangsa akan terus ada, bahkan jika penguasaan itu harus ditempuh melalui jalan perang. Dengan berkembangnya strategi perang danantisipasi dampak yang besar akibat dari perang konvensional, maka perang dapat dilakukan dengan cara skenario lain demi mengakomodir nafsu-nafsu imperialisme tersebut. Jika skenario ini berhasil, tentu akan berdampak bagi terpinggirkannya Ketahanan Nasional suatu bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Pengaruh Perang Modern terhadap menurunnya nasionalisme bangsa Indonesia dapat dilihat dari indikator panca gatra berikut ini:

- a. **Gatra Ideologi.** Mulai lunturnya semangat dan keyakinan akan jiwa Pancasila di sebagian besar rakyat Indonesia. Pemahaman terhadap ideologi Pancasila hanya sebatas pada penghafalan, namun belum pada tataran implementasi dan pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bahkan ada upaya-upaya dari beberapa pihak untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain.
- b. **Gatra Politik.** Dinamika reformasi politik menunjukkan sistem politik nasional mengalami perubahan paradigma yang mendasar. Demokrasi Pancasila yang diwujudkan oleh sistem 3 partai dan golongan yang bermuara pada kepemimpinan nasional yang cenderung absolut dan sentralistik, berubah menjadi multipartai bercirikan demokrasi dengan nuansa kebebasan yang cenderung tanpa batas diikuti oleh pengenalan tentang hak asasi manusia yang lebih berupa segala bentuk

perlawanan terhadap kemapanan daripada suatu tindakan kebebasan normatif manusia yang berlandaskan hukum. Diakomodasinya bentuk pluralistik sistem perpolitikan Indonesia yang diwakili oleh hadirnya berpuluh partai, yang berdiri di atas infrastruktur kemajemukan bangsa ditambah kebebasan berpendapat cenderung tanpa batas, telah menimbulkan indikasi ancaman disintegrasi bangsa, akibat kecenderungan didahulukannya kepentingan kelompok di atas kepentingan bangsa.

c. **Gatra Ekonomi.** Krisis ekonomi regional yang kemudian merembet ke Indonesia telah menghancurkan sendi-sendi dasar perekonomian Indonesia sehingga menciptakan berbagai permasalahan seputar kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan pendapatan serta berakibat pada turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Kestabilan nilai tukar menjadi dasar transaksi ekonomi sehari-hari yang berperan langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Melemahnya nilai tukar berhubungan erat dengan melemahnya daya beli masyarakat yang berdampak langsung pada turunnya tingkat kesejahteraan rakyat.

d. **Gatra Sosial Budaya.** Semangat gotong royong dan tenggang rasa yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia telah mengalami penggerogotan oleh nilai-nilai individualisme Barat sehingga sangat mempengaruhi gaya hidup dan pola hidup bangsa Indonesia, terutama kaum mudanya. Budaya pop (*Pop culture*) telah berhasil menggantikan budaya timur (*Rest culture*) akibat arus teknologi yang masuk ke Indonesia. Budaya lokal-nasional telah tergusur oleh proyek "uniformisasi budaya" global Barat. Karakter ego etnis merupakan titik rawan terjadinya konflik antar etnis. Akibatnya, manusia mulai menuhankan Postmodernisme sebagai tuhan baru yang kemudian semakin

mengucilkan dan memenjarakan manusia dalam gerakan implosi yang bebas nilai.

e. **Gatra Pertahanan dan Keamanan.** Adanya ancaman embargo persenjataan oleh AS telah melemahkan sistem pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia sehingga membuat TNI agak kesulitan dalam melengkapi dirinya dengan peralatan yang dibutuhkan, dihadapkan kepada luasnya wilayah yang harus dijaga yakni keseluruhan integritas wilayah Indonesia. Hal ini dapat dicontohkan dengan masuknya enam pesawat udara militer AS di Pulau Bawean tahun lalu yang tidak bisa dicegah oleh TNI. Selain itu, pencurian atas kekayaan laut oleh negara asing juga sulit diantisipasi oleh TNI. Keterbatasan anggaran pertahanan juga menjadi salah satu hal yang ikut melemahkan kehandalan kinerja TNI. Diperparah lagi dengan isu pembubaran Koter yang memperlemah TNI dan kejahatan trans nasional di wilayah perbatasan.

16. **Kondisi ketahanan nasional Indonesia saat ini.**

a. **Geografi.** Posisi letak geografis Indonesia yang terletak pada posisi silang dunia yaitu antara dua benua (Asia dan Australia) serta dua samudera (Samudra Hindia dan Samudra Pasifik) memiliki arti yang sangat strategis dalam pembangunan negara Indonesia baik dari segi ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Dengan posisi yang strategis tersebut, Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional baik itu dari laut maupun dari udara. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi negara yang berpotensi untuk mengembangkan sektor perdagangan serta pariwisata dalam rangka meningkatkan perekonomian bangsa. Indonesia juga menjadi negara maritim terbesar. Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena mempunyai lebih dari 17 ribu pulau. Berdasarkan statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan, hasil

laut di Indonesia baru dimanfaatkan 48% dari potensi sebesar 6,7 juta ton. Bagaimana jika dimanfaatkan 100%? Tentu hal ini akan mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Disamping itu, Indonesia juga menjadi negara agraris terbesar. Indonesia terletak dalam kawasan yang beriklim tropis yang menyebabkan tanah di Indonesia sangat subur. Hal yang demikian ini menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai negara pertanian dan perkebunan. Dalam kurun waktu orde baru, Indonesia pernah menjadi negara swasembada pangan, namun seiring dengan berjalannya waktu, swasembada pangan belum mampu direalisasikan kembali di tanah air. Dengan kondisi yang demikian maka diperlukan adanya ketahanan nasional untuk menjaga kesejahteraan dan keamanan bangsa.

Geografi merupakan wadah kehidupan yang harus dipersiapkan dan diperjuangkan, baik sebagai ruang juang, alat juang, maupun kondisi juang, baik untuk perseorangan, kelompok masyarakat, bangsa maupun negara. Hal ini kemudian melahirkan berbagai macam ilmu yang menempatkan geografi identik dengan suatu negara, yaitu ilmu geopolitik dan geostrategi dalam usaha mewujudkan cita-cita nasional suatu bangsa. Dalam proses mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional tersebut sebuah bangsa mau tidak mau selain harus mempunyai pemahaman serta pengelolaan yang cermat akan konsep geopolitiknya, juga harus mempunyai strategi yang bersifat nasional yang didasarkan pada kondisi statis dan dinamis suatu bangsa untuk mencapai apa-apa yang dicita-citakan maupun apa-apa yang menjadi tujuan mereka. Maka konsep geostrategi sungguh merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dalam usaha sebuah bangsa mencapai cita-citanya. Bagi bangsa Indonesia wawasan nusantara sebagai sebuah manifestasi ilmu

geopolitik merupakan konsep nasional tentang realitas diri dan kondisi lingkungannya yang didasarkan pada konsep persatuan dan kesatuan wilayah, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan untuk mencapai tujuan sebagai bangsa merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Namun begitu, untuk menjalankan konsep geopolitiknya tersebut dibutuhkan suatu strategi nasional yang cermat dan matang yang bisa secara sederhana kita sebut “geostrategi”. Geostrategi secara sederhana dapat diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Sir Balford Mackinder (1861-1947) guru besar geostrategi Universitas London telah mengembangkan teori “geostrategy continental” yang merupakan teori yang saat ini digunakannya baik oleh negara-negara maju maupun negara-negara berkembang (Suradinata, 2005: 10 dalam Kaelan, 2007: 143). Usaha Mackinder ini mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya konsep geostrategi bagi terwujudnya cita-cita sebuah bangsa dalam usaha mempertahankan kemerdekaannya maupun mengembangkan kehidupannya menuju puncak kejayaannya. Bagi bangsa Indonesia sendiri, geostrategi dapat diartikan secara lebih rinci sebagai metode/strategi untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, melalui pembangunan nasional. Karena tujuan itulah maka hal itu sebagai pegangan bahkan doktrin pembangunan dan dalam hal ini lazim disebut sebagai “ketahanan nasional”. Seperti tertera secara eksplisit dalam pembukaan UUD 1945 dijelaskan dalam alinea III tentang pernyataan proklamasi: “...kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...” (Kaelan, 2007: 143). Dari pernyataan dalam pembukaan UUD 1945 itu sungguh betapa penting rumusan para pendiri bangsa itu untuk menjadi pegangan dalam menjalankan strategi nasional, karena Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan geostrategi nasional Indonesia.

Bangsa Indonesia yang terdiri dan terbentuk dari berbagai macam etnis, suku, ras, golongan, agama dan terletak dalam sebuah teritori yang terpisah-pisahkan dalam wilayah kepulauan dan lautan, menjadikan konsep geostrategi seharusnya di dasarkan pada keunikan, keragaman, dan keberbedaannya dari konsep geostrategi nasional bangsa lain yang memiliki ciri dan karakter yang berbeda. Karena kita tahu, dengan corak dan perbedaan karakter bangsa yang khusus, maka konsep nasionalisme kita tentu juga bersifat khusus, dan oleh karena itu juga memerlukan konsep geostrategi yang khusus pula. Ciri-ciri atau prinsip-prinsip nasionalisme bangsa Indonesia seperti diutarakan oleh Notonagoro sebagai berikut:

- 1) Kesatuan sejarah. Negara Indonesia adalah merupakan buah kesadaran bangsa-bangsa Nusantara yang telah bergulat lama dalam rentang sejarah yang panjang. Yakni sejak periode pra sejarah, Hindu-Budha, zaman Islam, zaman kolonialisme, zaman pergerakan, hingga zaman perjuangan revolusi dan kemerdekaan. Konsep Kesatuan bangsa-bangsa nusantara di zaman kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit sungguh menjadikan bangsa Indonesia mempunyai perekat awal dalam usaha memerdekakan diri dari penjajahan kolonial. Konsep kesatuan/kesamaan sejarah ini tentu merupakan basis yang kokoh untuk mempertahankan kesatuan bangsa Indonesia di era pasca kemerdekaan.

2) Kesatuan nasib. Sejak kedatangan penjajah Belanda maupun sejak hidup dalam konsep kesatuan nusantara di jaman Majapahit dan Sriwijaya, bangsa Indonesia telah merasakan sebuah rangkaian sejarah yang sama. Oleh karenanya bangsa ini relatif memiliki kesamaan sejarah, baik dalam persatuan kerajaan nusantara, maupun dalam hal kesamaan penderitaan dan nasib sejak dijajah oleh para penjajah Eropa.

3) Kesatuan Kebudayaan. Dalam rangkaian pengalaman sejarah yang sama, bangsa Indonesia tentu mengembangkan suatu corak kebudayaan yang saling kait-mengait dan saling pengaruh-mempengaruhi. Corak tersebut tentu menghasilkan sebuah corak dan ciri kebudayaan yang beragam namun mempunyai nafas dan dinamika yang bersifat integratif, sehingga memunculkan apa yang sekarang disebut sebagai kebudayaan nasional Indonesia.

4) Kesatuan Wilayah. Kesadaran persatuan nusantara yang telah disemai oleh para pendahulu oleh kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dan kerajaan-kerajaan lainnya tentu telah mengilhami konsep persatuan wilayah yang berujung pada konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5) Kesatuan azas Kerohanian. Dalam rentang historis yang panjang, agama-agama dunia maupun pandangan-pandangan kepercayaan yang hidup dan berkembang di seluruh wilayah Nusantara telah membentuk konsep kerohanian yang padu tentang konsep ketuhanan yang diyakini oleh bangsa Indonesia. Konsep, ide, tujuan, cita-cita, dan nilai-nilai kerohanian tersebut akhirnya

termanifestasi dan tersimpul dalam dasar filosofis negara Indonesia yakni Pancasila (Notonagoro, 1975: 106).

Berangkat dari konsep dan prinsip-prinsip nasionalisme tersebut, konsep geostrategi Indonesia pertama-tama tidak dicirikan oleh geostrategi yang didasarkan demi kepentingan militer semata, melainkan sebuah geostrategi yang bertujuan dan dikembangkan untuk tujuan nasionalisme yang bersifat mulia yakni konsep kesejahteraan dan kemakmuran dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu corak geostrategi bangsa Indonesia dianggap sebagai cara atau metode

dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia dalam menentukan kebijakan, arahan serta sarana-sarana dalam mencapai tujuan seluruh bangsa dengan berdasar pada asas kemanusiaan dan keadilan sosial. Atau juga dapat dikatakan bahwa geostrategi Indonesia adalah memanfaatkan segenap kondisi geografi Indonesia untuk tujuan politik, dalam hal ini secara rinci dikembangkan dalam rangka pembangunan nasional (Armawi, 2005:1 dan Suradinata, 2005: 33).

b. **Demografi.** Berdasarkan data Worldometers, Indonesia saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 265 juta jiwa atau 3,49% dari total populasi dunia. Indonesia berada di peringkat keempat negara berpenduduk terbanyak di dunia setelah Tiongkok (1,4 miliar jiwa), India (1,3 miliar jiwa) dan Amerika Serikat (328 juta jiwa). Hal ini merupakan salah satu faktor pendukung dalam pembangunan nasional sekaligus dalam upaya mewujudkan ketahanan nasional, namun bisa juga sebagai faktor penghambat apabila tidak dikelola dengan baik dalam hal kualitas sumber daya manusianya. Dari jumlah penduduk yang demikian besar, maka ada beberapa hal yang

perlu dipertimbangkan terkait corak dan karakteristik kependudukan yang ada di Indonesia sebagai berikut:

1) Jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang berubah-ubah dan terus bertambah jika tidak diimbangi oleh konsep pembangunan ekonomi dan kebudayaan yang matang akan menimbulkan dampak-dampak negatif. Pertambahan jumlah penduduk ini dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas dan migrasi. Segi negatif dari pertambahan penduduk adalah bila pertambahan ini tidak seimbang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi serta tidak diikuti dengan usaha peningkatan kualitas penduduk akan menimbulkan permasalahan sosial seperti ketimpangan ekonomi dan pengangguran yang langsung maupun tidak langsung akan melemahkan ketahanan nasional.

2) Komposisi penduduk. Merupakan susunan penduduk berdasarkan pendekatan tertentu, seperti umur, jenis kelamin, agama, suku bangsa dan lain-lain. Komposisi penduduk dipengaruhi oleh mortalitas (kematian), fertilitas (kelahiran) dan migrasi. Fertilitas berpengaruh besar pada komposisi penduduk berdasarkan umur. Sebaliknya, pengaruh mortalitas relatif kecil. Masalah yang dihadapi adalah dengan bertambahnya penduduk golongan muda, maka akan timbul persoalan penyediaan fasilitas pendidikan, lapangan pekerjaan, dan sebagainya

3) Persebaran penduduk. Persebaran yang ideal harus memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan, yaitu persebaran yang proporsional. Pada kenyatannya, manusia ingin bertempat tinggal di daerah yang aman dan terjamin kehidupan ekonominya. Karena

hal inilah mengapa sampai terjadi daerah tertentu yang terlampau padat, sedangkan di daerah lain jarang penduduknya, bahkan sama sekali tak berpenduduk. Persebaran tidak merata, banyak terjadi di Pulau Jawa, Sumatera dan Bali. Ketidakmerataan ini tentu menjadi problem tersendiri bagi bangsa Indonesia. Persebaran penduduk yang tidak merata ini salah satunya juga disebabkan oleh ketidakmerataan ekonomi, sehingga menyebabkan terjadinya arus urbanisasi ke kota-kota besar, kepadatan penduduk, serta munculnya masalah-masalah baru seperti permukiman kumuh, kriminalitas, kemacetan, dan sebagainya.

4) Kualitas penduduk. Kualitas penduduk dipengaruhi oleh faktor fisik dan nonfisik. Faktor fisik meliputi kesehatan, gizi dan kebugaran. Faktor nonfisik meliputi kualitas mental dan kualitas intelektual. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah kependudukan ini antara lain melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, gerakan keluarga berencana, penyuluhan transmigrasi, peningkatan kualitas, keterampilan, kecerdasan dan sikap mental serta peningkatan kondisi sosial.

Masalah yang dihadapi Indonesia dewasa ini yang berhubungan dengan aspek kependudukan seperti pendapatan perkapita yang masih rendah, jumlah angka kelahiran yang besar, rasio ketergantungan yang tinggi, maupun rendahnya tingkat pendidikan merupakan faktor-faktor yang menentukan terkait konsep ketahanan nasional bangsa Indonesia. Apalagi di era globalisasi-informasi saat ini faktor peningkatan kualitas penduduk merupakan prasyarat utama untuk menghadapi tantangan-tantangan yang dibawanya. Dengan kualitas

penduduk yang tinggi, bangsa Indonesia akan dapat menjemput era Revolusi Industri 4.0 secara matang dan dewasa sehingga pembangunan bangsa Indonesia akan menuju apa-apa yang dicita-citakan selama ini.

c. **Sumber Daya Alam.** Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Sistem Pertahanan Negara Indonesia bersifat semesta yaitu melibatkan seluruh Warga Negara, Wilayah dan Sumber Daya Nasional lainnya meliputi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Untuk menjadi negara yang kuat, prasyarat utamanya adalah kemampuan negara untuk menata, menyiapkan dan menggunakan segala sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan nasional. Oleh karena itu, perlu pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara termasuk pengelolaan sumber daya alam. Kekayaan alam yang terkandung di bumi nusantara sebagai salah satu aset yang sangat strategis dalam membangun sistem perekonomian Indonesia yang dampaknya akan meningkatkan pembangunan sistem pertahanan Indonesia. Dalam konteks perang berlarut, potensi kekayaan alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah di Indonesia sangat berperan penting dalam mendukung perjuangan TNI dan rakyat Indonesia. Dengan demikian, maka pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yaitu “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat”²⁸. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya alam harus dimanfaatkan dan dikelola oleh pemerintah dalam hal ini BUMN, BUMD, dan BUMR (Badan Usaha Milik Rakyat) dan harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Kalaupun, eksplotasi dan pengelolaannya diserahkan kepada swasta, baik nasional maupun multinasional, negara (rakyat) harus mendapatkan porsi keuntungan lebih besar dan memegang penuh kedaulatan atas lahannya serta pemasaran. Sebaiknya, korporasi besar di bidang pertambangan, kehutanan, perkebunan dan SDA lainnya bermitra dengan masyarakat sekitar secara **win-win** dan saling menghormati. Pada tataran praktis, semua kegiatan eksploitasi (produksi), pengolahan (manufakturing), distribusi, dan pemasaran SDA harus sesuai dengan RTRW. Pastikan bahwa tingkat pemanenan pohon hutan, ikan di laut dan perairan umum darat dan SDA terbarukan lainnya harus tidak melebihi potensi produksi lestarnya. Begitu selesai menebang pohon hutan secara selektif, segera lakukan penanaman kembali, **restocking** dan **stock enhancement** wilayah-wilayah perairan yang *overfishing* dengan jenis-jenis ikan serta biota perairan lainnya, yang secara bio-ekologis cocok. Eksploitasi, produksi, dan distribusi SDA tidak terbarukan harus dilakukan secara ramah lingkungan. Dan, sebagian keuntungannya digunakan untuk mengembangkan material alternatif dan ekonomi wilayah yang lebih produktif, mensejahterakan masyarakat sekitar dan berkelanjutan.

Semua unit usaha (bisnis) di sektor SDA harus memenuhi **economy of scale**, menerapkan **integrated supply chain management system**, dari hulu hingga ke hilir, menggunakan teknologi mutakhir (**state of the art technology**) khususnya teknologi era Industri 4.0 yang ramah lingkungan dan sosial-budaya. Dengan begitu, maka usaha dan produk SDA

²⁸ Undang Undang 1945 pasal 33 ayat 3

yang Indonesia hasilkan akan lebih produktif, efisien, berdaya saing dan berkelanjutan untuk Indonesia yang maju, adil, makmur dan berdaulat.

d. **Kondisi Sosial.**

1) Ketahanan di bidang Ideologi. Ideologi mengandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Keampuhan suatu ideologi tergantung pada rangkaian nilai yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi kehidupan manusia baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan ideologi bangsa Indonesia. Ketahanan ini mengandung keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Perwujudan ketahanan ideologi tersebut memerlukan kondisi mental bangsa yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara serta berlandaskan pengamalan Pancasila secara konsisten dan berlanjut.

Pancasila merupakan ideologi nasional, dasar negara, sumber hukum, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pencapaian ketahanan ideologi memerlukan penghayatan dan pengamalan Pancasila secara murni dan konsekuen baik obyektif maupun subyektif. Pelaksanaan obyektif adalah pelaksanaan nilai-nilai secara tersurat yang terkandung dalam ideologi atau paling tidak secara tersirat dalam UUD 1945 serta segala

peraturan perundang-undangan dibawahnya dan segala kegiatan penyelenggaraan negara. Pelaksanaan subyektif adalah pelaksanaan nilai-nilai tersebut oleh masing-masing individu dalam kehidupan sehari-hari, sebagai pribadi, anggota masyarakat dan warga negara. Pancasila mengandung sifat idealistik, realistik dan fleksibel sehingga terbuka terhadap perkembangan yang terjadi. Tetapi keterbukaan itu sesuai dengan idealisme yang terkandung didalamnya.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia terdapat dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 dan Ketetapan MPR RI Nomor: XVIII/MPR/1998. Pancasila sebagai ideologi Nasional terdapat dalam Ketetapan MPR RI Nomor: XVIII/MPR/1998. Pancasila sebagai Pandangan Hidup dan sumber hukum terdapat dalam Ketetapan MPR RI Nomor: XX/MPR/1996 jo ketetapan MPR RI Nomor : DC/MPR/1978.

Dalam rangka menangkal ideologi lain selain Pancasila, baik itu radikal kiri maupun radikal kanan, maka diperlukan upaya memperkuat Ketahanan ideologi melalui langkah pembinaan sebagai berikut :

- a) Pengamalan Pancasila secara obyektif dan subyektif terus dikembangkan serta ditingkatkan baik itu dalam dunia pendidikan, lingkungan pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b) Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu terus direlevansikan dan diaktualisasikan nilai instrumentalnya agar tetap mampu membimbing dan mengarahkan kehidupan dalam bermasyara-

kat, berbangsa dan bernegara selaras dengan peradaban dunia yang berubah dengan cepat tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.

c) Sesanti Bhineka Tunggal Ika dan konsep wawasan nusantara yang bersumber dari Pancasila harus terus dikembangkan dan ditanamkan dalam masyarakat yang majemuk sebagai upaya untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta moralitas yang loyal dan bangga terhadap bangsa dan negara. Disamping itu anggota masyarakat dan pemerintah perlu bersikap wajar terhadap kebhinekaan.

2) Ketahanan di bidang politik. Ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan politik bangsa yang berisi keuletan, ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman hambatan serta gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung atau tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup politik bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketahanan politik adalah kehidupan politik bangsa yang didasarkan pada cita-cita pancasila dan UUD 1945. Sejak masa Reformasi dan era keterbukaan informasi yang melanda bangsa ini, tantangan-tantangan di ranah politik menjadi bertambah dan semakin kompleks. Prinsip-prinsip transparansi dalam kebijakan publik/politik, akuntabilitas, *good goverment/governance*, *law inforcement*, partisipasi luas publik, pemerintahan yang bersih, reformasi birokrasi, demokratisasi dan lain-lainnya telah menjadi norma keseharian dalam pemerintahan baik di tingkat nasional maupun daerah. Konsep ketahanan

politik di masa ini seharusnya adalah strategi dan metode ataupun usaha-usaha untuk menjawab tuntutan-tuntutan di atas. Di era globalisasi saat ini, kebebasan informasi yang disuarakan oleh pers dan media harus berperan aktif sebagai penyeimbang kekuasaan, bukan malah sebaliknya media digunakan oleh pihak penguasa sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan. Oleh karena itu, ketahanan nasional di bidang politik bisa direformulasi untuk menciptakan tata kelembagaan politik yang lebih terbuka, transparan, akuntabel, bersih, tidak korup, melibatkan partisipasi luas masyarakat, dan bersifat melayani. Kita tahu di era desentralisasi saat ini, korupsi tidak lagi terpusat pada simpul-simpul kekuasaan yang berada di pusat melainkan telah meresap di segala lini kehidupan politik, dari yang atas hingga yang bawah. Begitu pula dengan konflik SARA yang dikaitkan dengan politik untuk mengganggu stabilitas keamanan nasional, isu adanya penurunan paksa pemerintahan (makar) dan pelanggaran HAM yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan serta adanya isu-isu politik/hoaks yang terus bermunculan di media sosial. Tentu kondisi ini bisa menggerogoti kelembagaan politik bangsa Indonesia sehingga menjadi keropos dan akibatnya kesejahteraan sebagai cita-cita kehidupan bangsa ini terbengkalai. Dengan terus menyelenggarakan kehidupan demokratis yang didasarkan pada prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, serta permusyawaratan perwakilan dengan dasar persatuan dan ketuhanan untuk tercapainya keadilan sosial, ketahanan nasional harus menyusun dan membangun konsep kelembagaan maupun penyelenggaraan kehidupan politik yang demokratis, akuntabel, bersih, dan melayani. Dengan

demikian perlu adanya perwujudan ketahanan pada aspek politik bangsa yang sehat, dinamis dan mampu memelihara stabilitas keamanan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional baik politik dalam negeri maupun luar negeri.

a) Ketahanan pada aspek politik dalam Negeri.

(1) Sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan yang bersifat absolut dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat.

(2) Mekanisme politik yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat, namun perbedaan tersebut tidak menyangkut nilai dasar, sehingga tidak menjurus pada konflik fisik. Disamping itu timbulnya diktator mayoritas dan tirani minoritas harus dicegah.

(3) Kepemimpinan nasional harus mampu mengakomodasikan aspirasi yang hidup dalam masyarakat dan tetap berada dalam lingkup Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara.

(4) Terjalin komunikasi politik timbal balik antara pemerintah dan masyarakat serta antar kelompok/golongan dalam masyarakat dalam rangka mencapai tujuan nasional dan kepentingan nasional.

- b) Ketahanan pada aspek Politik Luar Negeri.
- (1) Hubungan luar negeri ditujukan untuk meningkatkan kerjasama internasional diberbagai bidang atas dasar sikap saling menguntungkan, meningkatkan citra positif Indonesia di luar negeri dan memantapkan persatuan bangsa serta keutuhan NKRI.
 - (2) Politik luar negeri terus dikembangkan menurut prioritas dalam rangka meningkatkan persahabatan dan kerjasama antar negara berkembang dan negara maju sesuai kemampuan demi kepentingan nasional. Peran Indonesia dalam membina dan mempererat persahabatan dan kerjasama antar bangsa yang saling menguntungkan perlu diperluas dan ditingkatkan. Kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN terutama dibidang ekonomi, IPTEK dan sosial budaya terus dijalankan dan dikembangkan. Peran aktif Indonesia dalam gerakan Non Blok dan aktif serta mengembangkan hubungan demi kerjasama antar negara dikawasan Asia Pasifik perlu terus ditingkatkan.
 - (3) Citra positif Indonesia terus ditingkatkan dan diperluas antara lain melalui promosi, peningkatan diplomasi, lobi internasional, pertukaran pemuda, pelajar dan mahasiswa serta kegiatan olahraga.
 - (4) Perkembangan perubahan dan gejolak dunia terus diikuti dan dikaji dengan

seksama agar terjadinya dampak negatif yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional dan menghambat kelancaran pembangunan dan pencapaian tujuan nasional dapat diperkirakan secara dini.

(5) Langkah bersama negara berkembang dengan negara industri maju untuk memperkecil ketimpangan dan mengurangi ketidakadilan perlu ditingkatkan melalui perjanjian perdagangan internasional serta kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional.

(6) Perjuangan mewujudkan tatanan dunia baru dan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui penggalangan, pemupukan solidaritas, kesamaan sikap serta kerjasama internasional dalam berbagai forum regional dan global. Peran aktif Indonesia dalam pelucutan senjata, pengiriman serta pelibatan pasukan perdamaian dan penyelesaian konflik antar bangsa perlu terus ditingkatkan. Upaya restrukturisasi PBB terutama Dewan Keamanan agar efektif, efisien dan demokratis harus terus dilaksanakan.

(7) Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilaksanakan dengan pembenahan sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan calon diplomat secara

menyeluruh agar mereka dapat menjawab tantangan tugas yang mereka hadapi. Selain itu aspek-aspek kelembagaan dan sarana penunjang lainnya perlu ditingkatkan.

(8) Perjuangan Bangsa Indonesia yang menyangkut kepentingan nasional, seperti melindungi kepentingan Indonesia dan melindungi hak-hak warga negara Republik Indonesia di luar negeri perlu ditingkatkan.

3) Ketahanan di bidang ekonomi. Ketahanan pada aspek ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, menciptakan kemandirian ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi dalam mewujudkan kehidupan rakyat yang makmur, adil dan sejahtera. Dengan demikian pembangunan ekonomi diarahkan pada mantapnya ketahanan ekonomi melalui iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, tersedianya barang dan jasa, terpeliharanya fungsi lingkungan hidup serta meningkatnya daya saing dalam lingkup perekonomian global.

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait peningkatan ketahanan di bidang ekonomi adalah sebagai berikut:

- a) Semakin terbukanya sistem perekonomian dunia yang bercorak kapitalis yang menyebabkan ketimpangan ekonomi dan ketidakmerataan kesejahteraan.
- b) Pembangunan struktur ekonomi yang bertumpu pada penguasaan modal, teknologi, sarana prasarana dan kemampuan manajerial.
- c) Pembinaan Sumber Daya Manusia yang menjadi titik kemampuan dalam mendukung pengelolaan sumber daya ekonomi.
- d) Pengelolaan sumberdaya alam yang memungkinkan peningkatan kesejahteraan yang memerlukan persediaan modal, perencanaan nasional, pelestarian masalah lingkungan hidup, dan penguasaan teknologi.
- e) Peningkatan kemampuan manajerial, baik ditingkat perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan pengawasan.
- f) Penyediaan dan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana yang mempermudah dan menunjang kegiatan ekonomi.
- g) Penciptaan birokrasi ekonomi yang efisien, terbuka, akuntabel dan ramah.

Oleh karena itu, pencapaian tingkat ketahanan ekonomi yang diinginkan memerlukan pembinaan berbagai hal, antara lain :

- a) Sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata diseluruh wilayah nusantara melalui ekonomi kerakyatan serta untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b) Ekonomi kerakyatan harus menghindari hal-hal berikut:
- (1) Sistem *free fight liberalism* yang hanya menguntungkan pelaku ekonomi kuat dan tidak memungkinkan perkembangan ekonomi kerakyatan.
 - (2) Sistem *etatisme* dalam arti negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sistem negara.
- c) Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.
- d) Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keselarasan dan keterpaduan antara sektor pertanian dan perindustrian serta jasa.
- e) Pembangunan ekonomi yang merupakan usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan dibawah pengawasan anggota masyarakat memotivasi dan mendorong peran serta

masyarakat secara aktif. Keterkaitan dan kemitraan antara para pelaku dalam wadah kegiatan ekonomi yaitu pemerintah, badan usaha milik negara, koperasi, badan usaha milik swasta dan sektor informal harus diusahakan demi mewujudkan pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas ekonomi.

f) Pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasilnya senantiasa dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan dan keserasian pembangunan antar wilayah dan antar sektor.

g) Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan secara sehat dan dinamis untuk mempertahankan serta meningkatkan eksistensi dan kemandirian perekonomian nasional. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya nasional secara optimal serta sarana IPTEK yang tepat guna menghadapi setiap permasalahan dan dengan tetap memperhatikan kesempatan kerja.

4) Ketahanan di bidang Sosial Budaya. Ketahanan di bidang sosial budaya atau ketahanan sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamis budaya bangsa Indonesia yang berisi keuletan, ketangguhan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya bangsa dan Negara Republik Indonesia. Wujud ketahanan nasional sosial budaya tercermin dalam kehidupan sosial budaya bangsa yang mampu

membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi dan seimbang serta mampu menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Esensi pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia adalah pengembangan kondisi sosial budaya dimana setiap warga masyarakat dapat merealisasikan pribadi dan segenap potensi manusiawinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang akan diwujudkan sebagai ukuran tuntutan sikap dan tingkah laku bagi bangsa dan negara Indonesia akan memberikan landasan, semangat dan jiwa yang menjadi ciri elemen-elemen sosial budaya bangsa dan negara Republik Indonesia. Ketahanan sosial menunjukkan adanya kemampuan komunitas untuk menghindari dan atau mengelola konflik, mencari berbagai solusi, seiring dengan perkembangan komunitas itu sendiri. Ketahanan sosial mencakup kemampuan internal untuk menggali konsensus dan mengatur sumber daya dan faktor eksternal yang dapat menjadi sumber ancaman, namun dapat diubah menjadi peluang. Kemampuan-kemampuan dalam ketahanan sosial masyarakat akan meningkatkan kewaspadaan nasional, karena pada dasarnya kewaspadaan nasional merupakan rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketahanan sosial dalam suatu masyarakat meliputi empat dimensi yang

berhubungan erat dengan kewaspadaan nasional dan ketahanan nasional sebagai berikut: Mampu melindungi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dari perubahan sosial yang mempengaruhi. Dalam arus globalisasi yang berkembang cepat, dimana tak ada lagi batas-batas negara, maka ditengah arus informasi dan komunikasi yang mendunia diperlukan kemampuan untuk memfilter pengaruh-pengaruh yang tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai kehidupan bangsa dan negara, seperti nilai-nilai kebebasan, kesetaraan dan faham liberal, pluralisme yang diterapkan tanpa dilandasi oleh adat budaya bangsa. Dalam era globalisasi terjadi pula suatu keadaan dalam masyarakat suatu sikap individualistik, materialistik, hedonistik yang berakibat merosotnya perhatian dan kepedulian terhadap eksistensi bangsa dan negara, sehingga warga negara tidak lagi peduli terhadap bangsanya. Bila tak mampu melindungi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dari perubahan sosial tersebut, maka akan terjadi degradasi moral, wawasan kebangsaan rapuh, hilangnya kesetiakawanan sosial, yang kuat menindas yang lemah, merebaknya korupsi, hilangnya keadilan serta terganggunya pembangunan nasional.

Perubahan tatanan sosial masyarakat atau perubahan sosial budaya sebuah masyarakat disebabkan oleh beberapa aspek antara lain, aspek geografis, biologis, teknologis, dan kultural. Faktor teknologi informasi yang berkembang saat ini misalnya telah ikut membentuk wajah dan kehidupan sosial maupun budaya bangsa Indonesia. Sejak era keterbukaan informasi merupakan wajah kebudayaan kontemporer kita sangat dipengaruhi oleh faktor desakan globalisasi teknologi

informasi tersebut. Kebudayaan populer atau sering dikenal dengan *Pop-culture* atau *mass culture* sebagai sebuah realitas kebudayaan yang tercipta dari menjamurnya media massa, baik televisi, koran, majalah dan media-media berbasis *online* telah membentuk sebagian besar wajah kebudayaan kontemporer kita. Globalisasi informasi juga dapat diartikan sebagai globalisasi kebudayaan. Dan ini sungguh didukung oleh faktor perkembangan teknologi informasi yang tidak lagi mengenal sekat-sekat nasionalisme. Fakta ini tentu menjadi tugas tersendiri bagi perumusan ketahanan nasional yang responsif dalam merawat kebudayaan-kebudayaan tradisional dan nasional yang menjadi akar dan sekaligus jangkar kepribadian bangsa. Namun, jika Indonesia tergolong bangsa yang optimis, maka globalisasi informasi dan kebudayaan bukanlah ancaman yang akan memupus watak dan kepribadian bangsa, melainkan sebuah tantangan untuk semakin kreatif untuk merawat, menjaga, sekaligus mengkontekstualisasi, meredefinisi, dan menyaji ulang kebudayaan kita secara kreatif, realistis dan kontekstual menghadapi tuntutan zaman. Dengan cara ini, ketahanan nasional di bidang kebudayaan akan lebih bersifat dinamis dan bergerak sesuai tuntutan zaman. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan ketahanan di bidang sosial budaya antara lain:

- a) Merekontekstualisasikan, mendinamisasi dan menyaji-ulang kebudayaan daerah secara kreatif, realistis dan mengikuti gerak zaman.
- b) Menghidupkan kebudayaan nasional yang bercorak integratif dan responsif untuk

pembentukan karakter bangsa Indonesia yang dinamis dan tanggap zaman.

c) Integritas nasional sebagai pandu ketahanan nasional di bidang sosial budaya.

d) Pengembangan kehidupan beragama dalam toleran, terbuka, dan berbudaya.

e) Pendidikan nasional yang demokratis untuk membentuk insan-insan berkarakter dan berbudaya yang nasionalis serta tanggap terhadap perkembangan zaman.

5) Ketahanan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pengertian ketahanan nasional di bidang pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara (patriotisme) yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, menyelenggarakan pembangunan serta mempertahankan kedaulatan negara dengan menangkal segala bentuk ancaman. Seperti terlukis dalam filsafat perang Indonesia: “Bangsa Indonesia sangat cinta damai, melainkan lebih cinta kemerdekaan”. Pertahanan dan keamanan harus dapat mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara yang berisi ketangguhan, kemampuan dan kekuatan untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bangsa Indonesia cinta damai akan tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan mengamankan kedaulatan negara merupakan suatu kehormatan demi martabat bangsa dan negara. Karena itu pertahanan dan keamanan harus diselenggarakan

dengan mengendalikan kekuatan dan kemampuan sendiri guna mengatasi ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar.

a) Terorisme. Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme, yang diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme, mendefinisikan terorisme adalah: Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Penggunaan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut tersebut kemudian dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti ancaman, intimidasi, pembajakan hingga peledakan bom. Peledakan bom sendiri adalah instrumen yang paling sering digunakan dalam tindakan terorisme. Dalam menangani ancaman terorisme yang terjadi di Indonesia, perlu adanya kombinasi pendekatan *hard approach* dan *soft approach*. Contoh

penggunaan *hard approach* adalah negara Amerika Serikat. Dibawah kepemimpinan Presiden George W. Bush, rumusan strategi kontra terorisme Amerika didasarkan pada empat strategi yang disebut juga sebagai 4D (*Defeat, Deny, Deminish, Defend*). Pertanyaannya adalah, apakah *hard approach* seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat cukup efektif untuk mengatasi terorisme? Jawabannya adalah masih belum efektif dalam mengatasi terorisme. *Hard approach* seperti yang dilakukan oleh Amerika memang telah berhasil mengatasi Osama bin Laden akan tetapi seperti yang kita ketahui bahwa ancaman terorisme dewasa ini tidak hanya datang dari kelompok Osama bin Laden yakni Al Qaeda tetapi ancaman juga datang dari kelompok yang menamai diri mereka Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), belum lagi karena *hard approach* begitu mengandalkan kekuatan militer maka diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk terus meningkatkan kekuatan militer tersebut. Bagaimana dengan pendekatan *soft approach*? Pendekatan *soft approach* yang dilakukan oleh Indonesia terlihat melalui program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Deradikalisasi merupakan suatu upaya pencegahan aksi terorisme agar para narapidana dan mantan narapidana atau pihak-pihak lain yang berpotensi melakukan aksi teror tidak melakukan kembali aksi terornya. Konsep deradikalisasi menggunakan teknik *Soft Power Approach* yaitu upaya pencegahan dengan

pendekatan yang bersifat komprehensif, persuasif, mengutamakan hati nurani dan rasa kemanusiaan dalam menyelesaikan masalah atau konflik. Pelaksanaan program deradikalisasi ini secara khusus dimaksudkan untuk membuka pemikiran yang semula fanatik dan sempit menjadi dapat menerima perbedaan secara terbuka. Namun pendekatan ini juga masih belum efektif, hal ini terlihat dari salah seorang pelaku bom buku di Solo, Jawa Tengah pada tahun 2011 yang bernama Juhanda, dimana pada tahun 2016 silam, Juhanda kembali melakukan aksi teror dengan meledakkan sebuah gereja di Samarinda, Kalimantan Timur. Aksi Juhanda ini membuat banyak pihak mempertanyakan efektivitas dari program deradikalisasi yang selama ini dijalankan oleh BNPT. Dengan demikian, perlu adanya kombinasi pendekatan *hard approach* dan *soft approach* dalam mengatasi aksi terorisme di Indonesia.

b) Narkoba. Saat ini Indonesia mengalami krisis multidimensi yang bisa mengancam stabilitas ketahanan nasional. Salah satu masalah yang amat serius adalah narkoba. Narkotika dinilai jauh lebih berbahaya dari ancaman terorisme internasional. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang tinggi dan dengan letak geografis yang menguntungkan. Hal ini menjadi salah satu penyebab mudahnya akses narkoba masuk ke Indonesia dan tentu saja, masuknya narkoba adalah ancaman besar bagi ketahanan nasional bangsa. Indonesia sudah terpetakan

dalam jaringan sindikat bandar narkoba dan obat-obatan berbahaya kelas internasional. Fakta akhir-akhir ini menunjukkan pabrik ekstasi di Cikande, Banten, atau di Batam, hingga Rutan dan Lapas yang merupakan penjara, dengan leluasa bisa memproduksi barang haram hingga mengedarkan ke jaringan dunia tanpa pernah terendus sejak dari awalnya, yang membuat miris adalah serangan narkoba dan obat-obatan (narkoba) terlarang terhadap generasi muda masa kini. Entah seperti apa masa depan ketahanan nasional, ketika generasi muda masa kini terus-menerus dilumpuhkan oleh narkoba. Generasi muda adalah generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih baik, tetapi pada masa kini sudah banyak generasi muda yang sudah terjebak dalam narkoba, baik menjadi pengedar ataupun pemakai. Seperti yang kita ketahui bahwa penyalahgunaan narkoba memiliki efek yang sangat buruk, terutama pada dampak fisik, emosi, dan perilaku. Adapun dampak terhadap perubahan fisik yaitu berat badan turun drastis, muka pucat, dan mudah terjangkit penyakit. Apabila kita memiliki generasi penerus bangsa yang sakit-sakitan, bangsa ini akan menjadi hancur karena stabilitas nasional akan terganggu, semua pekerjaan di segala segi terutama pemerintahan akan kacau karena tidak optimalnya kinerja dari generasi penerus untuk melakukan hal-hal yang sifatnya membangun bangsa. Adapun dampak perubahan emosi dan perilaku yaitu sangat sensitif dan mudah bosan, suka membangkang, malas,

sering melupakan tanggungjawab, suka mencuri, berbohong, dan masih banyak lagi. Bayangkan saja bila Indonesia memiliki generasi penerus yang malas, suka berbohong, dan mencuri, bangsa lain akan menilai bangsa Indonesia adalah bangsa yang buruk dan bangsa yang bodoh. Akibatnya, Indonesia akan terkucilkan dari pergaulan di lingkup internasional dan mungkin tidak ada negara yang mau bekerjasama dengan Indonesia nantinya. Proses narkoba menghancurkan ketahanan bangsa itu sendiri dimulai dari tingkat individu/pribadi, kemudian menyebar ke dalam suatu keluarga, kemudian meluas ke tingkat lokal dan meluas lagi ke tingkat daerah dan lama-kelamaan akan berkembang ke tingkat yang lebih luas yaitu tingkat nasional.

Secara lebih spesifik, dampak adanya penyalahgunaan narkoba pada sendi-sendi ketahanan bangsa khususnya bidang pertahanan dan keamanan adalah menurunnya patriotisme, nasionalisme, dan semangat bela negara. Oleh karena itu, perlu upaya memberantas peredaran narkoba dalam menjaga ketahanan nasional di era globalisasi saat ini diantaranya sebagai berikut:

- (1) Perlu ditingkatkan kembali kerja sama antara Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, Kejaksaan dan masyarakat mengenai upaya pemberantasan narkoba di seluruh Indonesia.

(2) Perlunya penyuluhan yang terus menerus kepada generasi muda dan masyarakat tentang bahaya dari narkoba seperti penggunaan media cetak dan elektronik, sekolah-sekolah, kampus dan kantor-kantor baik pemerintahan dan swasta.

(3) Perlunya pengawasan dan usaha keras dari pemerintah mengenai praktik pengedaran narkoba baik secara langsung maupun di media online yang lagi marak sekarang ini. Mengenai kejahatan dunia maya atau *cyber crime* perlu dilakukan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

(4) Perlunya konsistensi hukuman bagi pengedar narkoba dalam upaya pemberian efek jera, dimana saat ini opsi hukuman mati telah diterapkan dan hal ini harus terus direalisasikan.

(5) Upaya pemberantasan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan perlu ditingkatkan karena Lapas disinyalir sebagai tempat pengedar atau bahkan sebagai tempat pembuat atau pabrik narkoba serta manajemen Lapas perlu diperbaiki kembali.

(6) Perlunya tes urine narkoba bagi setiap pegawai atau aparat pemerintah yang dilakukan secara rutin.

(7) Perlunya pendidikan dan perhatian dari orangtua untuk mendidik anaknya mengenai bahaya narkoba sejak dini.

c) Gerakan Separatis Bersenjata. Gerakan separatis bersenjata merupakan ancaman terhadap sistem pertahanan negara, yang bersifat nirmiliter dan berskala nasional. Penyelesaian ancaman ini menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Sementara itu, peran negara sebagai aktor penyelesaian ini merujuk pada otoritas politik yang sah dan secara operasional memobilisasi kekuatan militer, termasuk di dalamnya *civil society*. Untuk itu, ancaman disintegrasi yang berupa gerakan separatisme masih menjadi ancaman nyata dan membahayakan bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia merupakan negara dengan banyak multikultur bisa dilihat segi ras, agama, bahasa, suku dan adat istiadat. Keanekaragaman tersebut juga mengandung potensi konflik yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mengancam keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa, seperti gerakan separatisme berbau radikalisme dan kedaerahan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Hal ini bisa diakibatkan dari ketidakpuasan dan perbedaan kepentingan berujung terjadinya disintegrasi bangsa. Ancaman disintegrasi bangsa masih terjadi di wilayah NKRI seperti di Papua. Untuk itu, diperlukan ketahanan nasional bangsa dalam memberantas sel-sel tersebut. Dalam menghadapi ancaman gerakan separatisme, pemerintahan Indonesia yakin bahwa

penyelesaian masalah ini hanya dapat dilakukan secara menyeluruh dan damai jika masyarakat sadar bahwa kita semua adalah satu bangsa dan satu tanah air yaitu NKRI. Terkait gerakan separatisme Papua, pemerintah harus terus mengupayakan untuk menyelesaikan permasalahan separatisme ini, baik melalui kegiatan represif terhadap kelompok bersenjata maupun persuasif melalui upaya meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga penyelesaian ini dapat diselesaikan secara komprehensif dan menyeluruh dalam kerangka otonomi khusus. Selain itu, disamping terus menjaga keamanan di Papua dan endemi separatisme di Indonesia, sangat diperlukan upaya untuk menangkal propaganda negatif yang dilakukan oleh gerakan separatis di luar negeri dan meningkatkan upaya diplomasi untuk meyakinkan masyarakat internasional akan pentingnya menjaga kedaulatan Indonesia.

Langkah kebijakan yang ditempuh dalam upaya pencegahan dan penanggulangan separatisme adalah pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban serta menindak secara tegas para pelaku separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil, peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi serta demokratisasi, peningkatan deteksi dini dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme. Artinya, penyelesaiannya bercirikan lengkap, luas dan menyeluruh. Menggunakan semua perangkat yang ada dengan mengefektifkan fungsi-fungsi

pembangunan nasional. Melibatkan semua elemen bangsa dan negara karena semua warga negara bertanggung jawab atas keutuhan NKRI. Menggabungkan seluruh potensi yang ada dan menggunakan pendekatan yang holistik di semua bidang. Dengan kata lain, penyelesaian komprehensif berarti penyelesaian yang bersifat “semesta”. Tujuan dari penyelesaian secara holistik adalah agar permasalahan dua ancaman itu dapat dipangkas dan dicabut hingga ke akar-akarnya, tanpa meninggalkan ancaman lain dalam bentuk laten.

Jika ancaman tersebut masuk kategori ancaman nirmiliter, maka penyelesaiannya pun menggunakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Sifat nirmiliter ini jelas melibatkan semua warga negara dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi pembangunan nasional, misalnya dengan pendekatan keadilan dan kesejahteraan (*prosperity approach*), selain pendekatan pertahanan dan keamanan (*security approach*). Oleh karena itu, pengenalan terhadap budaya menjadi kunci untuk menemukan pintu masuk pendekatan yang akan dipilih. Di sinilah perlunya keterlibatan dan peran aktif dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, adat, dan komponen lainnya dalam masyarakat. Penyelesaian dalam memberangus gerakan separatis dan pemberontakan bersenjata memang tepat sekali jika menggunakan penyelesaian secara komprehensif. Jika dilihat dari kacamata Sistem Pertahanan Negara (Sishanneg), penyelesaian ini bersifat

“semesta”. Artinya, tidak hanya sekadar komprehensif, melainkan komprehensif-integral yaitu lengkap, luas, sekaligus menyeluruh.

d) Konflik komunal. Konflik komunal yang kerap terjadi di berbagai wilayah Indonesia merupakan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Eskalasi konflik yang membesar dapat menyebabkan instabilitas dan disintegrasi bangsa. Konflik komunal secara terminologis adalah perselisihan, pertengkaran dan peperangan yang melibatkan kelompok dengan kelompok karena ada sesuatu hal yang diperjuangkan baik secara material, non material dan gabungan material-non material. Sebagai negara yang tinggi tingkat keragaman budayanya, tentu ikatan komunal yang terjalin di Indonesia juga sangat beragam. Ironinya dibanding menyatukan, perbedaan nilai ini di masing-masing daerah kerap menjadi bibit berbagai konflik. Konflik komunal yang terjadi seperti di Poso, Maluku dan Sampit adalah konsekuensi logis dari keberagaman suku, agama, ras dan golongan yang ada di Indonesia. Sehingga diperlukan adanya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, saling hormat-menghormati keberagaman yang ada sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Namun tidak menutup kemungkinan substansi lainnya adalah karena ekonomi, seperti dalam kasus di Maluku, tidak meratanya kesejahteraan yang dirasakan sebagian penduduk asli yang kebetulan mayoritas beragama Kristen, namun di lain pihak kaum

pendatang yang beragama Islam memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih, karena keuletan dan sikap *survive* mereka sehingga lebih maju dalam status sosial ekonomi yang menimbulkan kecemburuan. Kemudian dalam perkembangannya, adanya sentuhan politik oleh segelintir kelompok yang memanfaatkan situasi, sehingga terciptalah konflik Sara dengan eskalasi yang besar dan durasi yang cukup lama, sehingga menimbulkan efek destruktif yang sangat besar antara lain korban jiwa, harta benda dan hancurnya infrastruktur fisik dan sosial di wilayah konflik. Bila ditinjau dari eksistensi sebuah negara, maka konflik-konflik tersebut tentunya akan menjadi sebuah ancaman bagi keutuhan NKRI, yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, perlu menjadi perhatian bagi seluruh elemen bangsa untuk melakukan antisipasi atau pencegahan agar konflik komunal bisa diminimalisir dan dihilangkan di Indonesia melalui:

- (1) Pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan keindonesiaan dapat tertanam dalam sanubari setiap rakyat Indonesia.
- (2) Pemahaman nilai-nilai toleransi, demokrasi, pluralisme dan kemajemukan kepada segenap masyarakat Indonesia.
- (3) Pemahaman nilai-nilai universal kemanusiaan sebagai wujud bahwa semua manusia adalah bersaudara, serta saling menghormati dan menghargai satu sama lain.

17. Peran TNI dalam upaya memelihara dan meningkatkan ketahanan nasional. Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai salah satu lembaga negara dibentuk untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional. Kepentingan nasional yang dimaksud yaitu tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan pembangunan dan tujuan nasional. Tujuan nasional tersebut sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sehingga, TNI mempunyai peran strategis dalam upaya memelihara dan meningkatkan ketahanan nasional guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang telah disebutkan di atas.

- a. Sebagai kekuatan pertahanan. Sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang, bahwa TNI memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.²⁹ Kebijakan yang diambil untuk menghadapi ancaman dan gangguan adalah dengan mengatasinya secara bertahap sesuai dengan fungsi TNI. Strategi yang diterapkan TNI untuk merealisasikan kebijakan tersebut yaitu melaksanakan OMP (Operasi Militer Perang) dan

²⁹ UU RI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 7

OMSP (Operasi Militer Selain Perang) dengan menggunakan kekuatan TNI yang sudah disiagakan.

1) OMP. TNI melaksanakan OMP untuk menghadapi agresi dan konflik bersenjata dengan satu negara atau lebih dilaksanakan dengan sistem pertahanan negara bersifat semesta melalui tahapan-tahapan penangkalan, penindakan, dan pemulihan.

a) Penangkalan. Pada tahap penangkalan dilaksanakan strategi penggunaan kekuatan TNI melalui kegiatan dan operasi militer sesuai kebijakan dan politik negara meskipun belum ada pernyataan perang oleh Presiden. Pada tahap ini, TNI bersinergi dengan K/L terkait lainnya. Kegiatan penangkalan ini dilaksanakan dengan pembangunan kekuatan dan diplomasi militer. Pembangunan kekuatan dilakukan secara terus-menerus sesuai perkembangan teknologi modern.

b) Penindakan. Pada tahap penindakan dilaksanakan strategi yang menggunakan kekuatan TNI sesuai kebijakan dan keputusan politik negara dan/atau setelah adanya pernyataan perang oleh Presiden. Strategi menghadapi musuh dilakukan melalui Operasi Intelijen, Operasi Tempur, Operasi Teritorial, Diplomasi Militer dan Operasi Informasi. Untuk sasaran yang bernilai strategis terpilih dilaksanakan operasi khusus. Bantuan dari luar TNI yang diperlukan untuk memperkuat komponen utama bersifat opsional melalui mobilisasi komponen cadangan dan pendukung. Strategi penindakan yang diselenggarakan bersifat defensif aktif (*active defence*)

dengan menggunakan pola pertahanan berlapis (*defence in depth*). Tindakan yang dilakukan, yaitu: menghancurkan musuh di pangkalannya, dalam perjalanan dan setelah masuk ke wilayah NKRI. Selanjutnya, apabila musuh berhasil merebut dan menguasai seluruh atau sebagian wilayah NKRI maka dilaksanakan perang berlarut dengan taktik gerilya. Pada tahap penindakan ini dilaksanakan secara efektif dengan didukung teknologi informasi yang modern, di antaranya *Network Centric Warfare* (NCW).

c) Pemulihan. Pada tahap ini dilaksanakan operasi militer dan kegiatan pemulihan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara terkait persetujuan gencatan senjata. Operasi yang dilaksanakan antara lain: Operasi Pemindahan ke Belakang atau melakukan penarikan kekuatan yang tidak dibutuhkan, Operasi Teritorial, Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dan Kekuatan Pendukungnya untuk siap menghadapi perkembangan situasi. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: rekonstruksi, rehabilitasi, konsolidasi yang bersinergi dengan K/L terkait lainnya.

2) OMSP. TNI melaksanakan OMSP untuk menghadapi ancaman bersenjata, ancaman nonmiliter dan gangguan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Penangkalan. Pada tahap ini dilaksanakan strategi yang menggunakan kekuatan TNI melalui kegiatan dan operasi militer dalam rangka menangkal ancaman bersenjata, ancaman

nonmiliter dan gangguan. Operasi yang dilaksanakan antara lain: Operasi Mengatasi Gerakan Separatisme Bersenjata, Operasi Mengatasi Pemberontakan Bersenjata, Operasi Mengatasi Aksi Terorisme, Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, Operasi Pengamanan Objek Vital Nasional, Operasi Pengamanan Wilayah NKRI, Operasi Pengamanan Presiden dan Wapres beserta keluarganya, serta Operasi Membantu Pengamanan Tamu Negara Setingkat Kepala dan Perwakilan Pemerintah Asing yang sedang berada di Indonesia, Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, Operasi Perdamaian Dunia, Operasi Membantu Pemerintah di Daerah, Operasi Membantu Polri dalam rangka Kamtibmas, Operasi Membantu Menanggulangi Akibat Bencana Alam, Pengungsian dan Pemberiaan Bantuan Kemanusiaan, Operasi Membantu Pencarian dan Pertolongan dalam kecelakaan serta Operasi Membantu Pemerintah dalam Pelayaran dan Penerbangan yang didukung oleh Operasi Teritorial, Operasi Intelijen dan Operasi Informasi.

b) Penindakan. Pada tahap penindakan dilaksanakan strategi penggunaan kekuatan TNI melalui Operasi Militer untuk menindak langsung lawan setelah adanya kebijakan dan keputusan politik negara, misalnya setelah pernyataan status darurat sipil atau darurat militer.

c) Pemulihan. Pada tahap pemulihan dilaksanakan strategi penggunaan kekuatan TNI melalui Operasi Militer dan kegiatan pemulihan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik

negara. Operasi yang dilaksanakan antara lain: Operasi Teritorial, Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dan kekuatan pendukungnya untuk siap kembali menghadapi perkembangan situasi. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: rekonstruksi, rehabilitasi, konsolidasi yang bersinergi dengan K/L terkait lainnya.

b. Sebagai kekuatan moral. Kekuatan moral diaktualisasikan melalui komitmen kebanggaan sebagai warga negara, percaya akan masa depan bangsa yang lebih baik, setia kepada negara dan pemerintah, memegang teguh nilai-nilai kebanggaan serta menegakkan nilai-nilai universal seperti demokrasi, hukum dan hak asasi manusia. Disamping itu, kekuatan moral juga diarahkan untuk membangun keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Sebagai kekuatan moral (*moral force*), TNI harus mampu melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan masuknya ancaman di bidang ideologi (Liberal, Khilafah Islamiah, Komunis Gaya Baru/*new left*), politik (politik demokrasi liberal dan demokrasi lain yang tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila), ekonomi (sistem Kapitalis Liberal), sosial budaya (disorientasi tujuan, paham materialisme, konsumerisme, hedonisme, permisivisme, individualisme dan lain-lain) dan agama (adu domba antar/intern umat beragama, munculnya aliran sesat dan lain-lain). Disamping itu, secara internal TNI dituntut untuk mampu meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai kejujuran ke dalam institusi TNI sendiri. Sedangkan secara eksternal TNI dapat dan perlu :

- 1) Membantu pemerintah dalam upaya memperkuat Nasionalisme, Wawasan Kebangsaan, Patriotisme dan Kesadaran Bela Negara.

2) Membantu dan mendukung upaya mempertahankan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai luhur lainnya terutama yang terkandung dalam Pembukaan UUD 45.

3) Membantu memberikan pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat untuk menyadari bahaya ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti neoliberalisme, kapitalisme, komunisme, khilafahisme, radikalisme, terorisme dan sebagainya.

4) Membantu upaya rekonsientisasi (penyadaran kembali dan terus-menerus) bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang terlibat dalam "peperangan non-militer" (perang informasi, perang ekonomi, perang ideologi dan sebagainya) sehingga perlu dibangun kembali kesadaran dan kewaspadaan masyarakat.

c. Sebagai kekuatan kultural. Sebagai komponen bangsa yang memiliki potensi dan kekuatan besar, TNI tentu saja terdorong untuk ikut memberikan andil bagi peningkatan kemaslahatan, kebaikan dan keberadaban masyarakat Indonesia melalui "jalan kultural" artinya, ikut dalam pembangunan kultur keindonesiaan melalui disiplin dan keteladanan serta nilai-nilai positif konstruktif yang dapat dipancarkan oleh segenap warga TNI. Secara internal, kekuatan kultural tersebut dapat diaktualisasikan dalam wujud upaya meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai unggul budaya bangsa Indonesia seperti gotong-royong, kekeluargaan, toleransi, sikap ramah, kerelaan berkorban tanpa pamrih dan sebagainya. Secara eksternal, hal itu dapat diwujudkan dengan:

1) Memperkokoh dan meningkatkan kemanunggalan TNI dengan Rakyat.

2) Ikut serta memperkuat nilai unggul budaya bangsa seperti disebut di atas, sekaligus mengikis "kelemahan

kultural” bangsa yang termanifestasi dalam fenomena negatif destruktif seperti feodalisme, sikap malas, hipokrit dan kecenderungan mencari kambing hitam atau melemparkan tanggung jawab kepada orang lain (pendapat antropolog Prof. Dr. Koentjaraningrat).

Untuk memelihara kultur dan nilai-nilai bangsa Indonesia tersebut, TNI dapat mengambil peran sebagai berikut:

- 1) Menjadi teladan kepada masyarakat dalam memelihara dan melestarikan jati diri bangsa dan nilai-nilai luhur bangsa antara lain berupa ketaqwaan kepada Tuhan YME, memperlakukan dan menghormati orang lain secara kemanusiaan yang adil dan secara beradab, memelihara persatuan dan kesatuan nasional/Bhineka Tunggal Ika, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan masalah bangsa, melaksanakan kegiatan kehidupan yang didasarkan kepada kepentingan rakyat.
- 2) Memelihara dan meningkatkan wawasan kebangsaan di dalam kehidupan masyarakat (memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi dan pertahanan/keamanan) sehingga semua komponen bangsa akan berupaya untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI, politik bangsa, ekonomi bangsa dan bersama-sama menjaga keamanan bangsa.
- 3) Meningkatkan rasa kebangsaan/nasionalisme (setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, cinta tanah air, rela berkorban untuk bangsa dan negara, tidak kenal menyerah dalam membela negara dan bangsa, cinta kepada produk Indonesia) sehingga akan terbina semangat ”bela negara” terhadap segala bentuk ancaman.

4) Memberikan tauladan dalam rangka menularkan, memelihara nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa serta meningkatkan wawasan kebangsaan dan nasionalisme yang dilakukan dengan melaksanakan "Kepemimpinan dan Komunikasi Sosial TNI" (KKS TNI).

5) Memelihara semangat sebagai Tentara Pejuang yang akan selalu terus mengobarkan semangat perlawanan dengan tidak kenal menyerah terhadap ancaman non-militer yang berupa paham atau ajaran atau sistem kehidupan dari luar yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dengan cara memelihara dan meningkatkan semangat bela negara, rasa cinta tanah air dan semangat rela berkorban untuk kepentingan membela NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dari penjelasan tentang peran TNI sebagai kekuatan pertahanan, sebagai kekuatan moral dan sebagai kekuatan kultural, mencerminkan bahwa keberadaan TNI dalam mewujudkan ketahanan nasional sangatlah vital. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk membangun kekuatan TNI dalam memelihara dan meningkatkan ketahanan nasional yang tangguh guna menjamin tetap tegaknya NKRI, sebagai berikut:

- a. **Pengembangan sistem dan strategi pertahanan.** Bertujuan untuk mewujudkan rumusan kebijakan umum dan kebijakan pelaksanaan serta perencanaan strategis yang meliputi pembinaan dan pendayagunaan komponen pertahanan negara dalam rangka menghadapi ancaman dan gangguan termasuk pencegahan serta penanggulangan separatisme. Beberapa hal pokok yang perlu dilakukan adalah:

- 1) Penyusunan *Strategic Defense Review* (SDR), Strategi Raya pertahanan, Postur Pertahanan dan Kompartemen Strategis.
- 2) Penyusunan manajemen aset sistem pertahanan termasuk alutsista.
- 3) Pelaksanaan survei dan pemetaan darat, laut dan udara serta pengembangan sistem informatika.
- 4) Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, prajurit dan peralatan.
- 5) Pengembangan sistem dan strategi ketahanan nasional yang meliputi sistem politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
- 6) Telaahan/perkiraan/apresiasi strategi nasional serta evaluasi dan monitoring ketahanan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

b. **Pengembangan pertahanan integratif.** Bertujuan untuk mewujudkan kesiapan TNI yang terdiri dari matra darat, laut dan udara secara terintegrasi agar mampu menyelenggarakan pertahanan negara secara terpadu. Beberapa hal pokok yang perlu dilakukan adalah:

- 1) Pengembangan sistem berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan.
- 2) Pengembangan personil TNI dengan melaksanakan perawatan personil dalam rangka mendukung hak-hak prajurit serta melaksanakan werving prajurit TNI Perwira Prajurit Karir (PK), Perwira Prajurit Sukarela Dinas Pendek (PSDP) Penerbang dan PNS.

- 3) Pengembangan materiil TNI yang meliputi pengadaan/pemeliharaan senjata dan munisi, kendaraan tempur, alat komunikasi, alat peralatan khusus (Alpalsus), alat peralatan (Alpal) darat laut dan udara.
- 4) Pengembangan fasilitas berupa pembangunan/renovasi fasilitas pendukung operasi, lembaga pendidikan serta sarana dan prasarana pendukung seperti mess, asrama dan rumah dinas.
- 5) Pelaksanaan kegiatan operasi dan latihan militer integratif dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional.
- 6) Pelaksanaan operasi militer selain perang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta kebijakan dan keputusan politik negara.

c. Pengembangan industri pertahanan. Bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan kondisi alat utama sistem persenjataan yang modern. Beberapa hal pokok yang perlu dilakukan adalah:

- 1) Perbaikan, pemeliharaan, penggantian dan pengadaan peralatan pertahanan termasuk Alutsista modern.
- 2) Pengembangan kerjasama bidang kedirgantaraan, perkapalan, teknik sipil, industri alat berat, otomotif, elektronika dan industri nasional lainnya.
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang desain dan engineering, meliputi keahlian dan kemampuan mengembangkan dan pembuatan pesawat angkut militer, pesawat misi khusus, kapal patroli cepat, kapal perang, kendaraan tempur militer, sistem senjata, sistem jaringan komunikasi, pusat komando dan pengendalian serta sistem informasi.

4) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta industri nasional dalam rangka pembangunan dan pengembangan kekuatan pertahanan negara serta menciptakan kemandirian, sekaligus memperkecil ketergantungan di bidang pertahanan terhadap negara lain.

d. **Operasi Bhakti TNI.** Bertujuan untuk mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat melalui pelaksanaan kegiatan bantuan kemanusiaan dan Bhakti Sosial Kemasyarakatan dalam rangka membantu otoritas sipil untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi terwujudnya keamanan dalam negeri. Beberapa hal pokok yang perlu dilakukan diantaranya adalah pemberian bantuan kepada pemerintah sipil berdasarkan permintaan sesuai dengan UU serta melaksanakan kegiatan non fisik yang meliputi penyuluhan kesehatan, penyuluhan hukum, penyuluhan HAM dan penyuluhan bela negara.

e. **Kerjasama militer internasional.** Bertujuan untuk meningkatkan kerja sama militer dengan negara-negara sahabat dalam rangka menciptakan kondisi keamanan kawasan, regional dan internasional serta untuk meningkatkan hubungan antar negara. Beberapa hal pokok yang perlu dilakukan adalah:

- 1) Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-Singapura dalam bentuk latihan dan perjanjian *Military Training Area* (MTA).
2. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-Malaysia dalam bentuk latihan militer bersama seperti KEKAR MALINDO (Malaysia Indonesia), MALINDO JAYA, ELANG MALINDO, AMAN MALINDO dan DARSASA.
- 3) Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia dengan negara-negara yang berbatasan langsung dalam bentuk pengiriman personil militer yang bertugas sebagai pengawas internasional dalam permasalahan perbatasan

dan penanganan lintas batas gerakan separatisme melalui forum *Joint Commision for Bilateral Cooperation*.

4) Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia dengan negara-negara Eropa, Australia, China, Rusia terutama dalam hal bantuan pelatihan militer dan pengadaan peralatan TNI.

5) Penyiapan pasukan *peace keeping operation* yang setiap saat siap untuk digerakkan dan diwujudkan dalam tingkat pelatihan satuan dan kurikulum pendidikan.

6) Pengiriman *Liaison Officer* (LO) ke negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia.

f. **Penelitian dan pengembangan pertahanan.** Bertujuan untuk melakukan penelitian dan pengembangan terhadap strategi dan sistem pertahanan, sumber daya manusia, kemampuan dan pendayagunaan industri nasional serta penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pertahanan negara. Beberapa hal pokok yang perlu dilakukan adalah:

1) Kerjasama penelitian dan pengembangan pertahanan guna menghasilkan kajian-kajian tentang konsep pertahanan.

2) Penelitian dan pengembangan bidang materiil dan insani.

3) Kerjasama penelitian dan pengembangan bidang kedirgantaraan, perkapalan, teknik sipil, industri alat berat, otomotif, elektronika dan kimia untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan.

BAB V

PENUTUP

18. Kesimpulan.

a. Bahwa niat menguasai suatu negara atau nafsu imperialisme akan terus terjadi dimuka bumi ini sejalan dengan kodrat manusia. Dengan berkembangnya strategi perang dan memikirkan resiko kehancuran saat ini, perang dilakukan dengan skenario lain tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Skenario ini dilancarkan dengan memaksa elite suatu bangsa agar silau dan terpengaruh terhadap faham luar, yang pada akhirnya mengakibatkan suatu bangsa terpecah dan terkotak-kotak. Inilah yang disebut sebagai perang masa kini atau "perang modern" dimana perang ini kehancurannya lebih dahsyat dibandingkan dari perang konvensional dengan pengerahan Alutsita, karena negara sasaran akan dihancurkan secara sistemik yang pada akhirnya negara sasaran tidak eksis sebagai negara/bangsa.

b. Kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan Ketahanan nasional yang mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sehingga ketahanan nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI yang dilandasi Pancasila, UUD 1945 dan landasan visional Wawasan Nusantara. Dalam mewujudkan ketahanan nasional diperlukan kesadaran setiap warga Indonesia yang memiliki semangat perjuangan non fisik berupa keuletan dan ketangguhan yang tidak mengenal menyerah serta mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam serta sadar dan peduli terhadap pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya

dan Hankam guna menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

c. Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat negara dibidang pertahanan memiliki peran strategis baik itu sebagai kekuatan pertahanan, sebagai kekuatan moral dan sebagai kekuatan kultural dalam memelihara dan meningkatkan ketahanan nasional guna menghadapi perang modern terutama di era globalisasi, teknologi dan informasi saat ini. Untuk merealisasikan tercapainya peran tersebut secara optimal, maka perlu dilakukan pengembangan sistem dan strategi pertahanan, pengembangan pertahanan integratif, pengembangan industri pertahanan, operasi Bhakti TNI dan kerjasama militer internasional dalam rangka membangun postur TNI berupa kekuatan, kemampuan dan gelar satuan secara efektif, efisien dan modern serta berdaya guna.

19. **Saran.** Berdasarkan gambaran kesimpulan tersebut, dapat ditarik beberapa hal formulasi rekomendasi sebagai berikut:

a. Untuk menghadapi Perang Modern, perlu perumusan kebijakan publik yang mengarah pada penyadaran terwujudnya rekonsiliasi dan revitalisasi wawasan kebangsaan dengan fokus pada tiga pilar pembangunan yaitu "*state, nation dan character building*" yang berbasis spiritual.

b. Perlu adanya modernisasi Alutsista yang berpedoman pada Renstra TNI serta penggantian Alutsista yang usia teknisnya sudah tua, bahkan sudah tidak dapat dioperasikan lagi yang dapat membahayakan keselamatan prajurit.

c. Perlu adanya peningkatan profesionalisme prajurit melalui pendidikan dan latihan, *Transfer of Technology* dan *Transfer of Knowledge* (ToT/ToK) dalam hal Alutsista baru yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan prajurit.

d. Pendayagunaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan, peningkatan penelitian dan pengembangan, serta dukungan pendanaannya.

Bandung, Juni 2019
Komandan Seskoad,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by several smaller, connected strokes, ending in a horizontal line.

Kurnia Dewantara
Mayor Jenderal TNI